



LAPORAN PELAKSANAAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2018



P E M E R I N T A H
K A B U P A T E N A C E H T A M I A N G
T A H U N 2 0 1 8

KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 213 Tahun 2013, tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Sekretariat, Kelompok Kerja dan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Tamiang. Berdasarkan Perpres No.15 tahun 2010. Sebagai mitra TNP2K, dibentuklah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kab/Kota berdasarkan Permendagri No. 42 tahun 2010.

Kebijakan pembangunan Daerah kabupaten Aceh Tamiang dalam rangka penanggulangan kemiskinan terkait dimensi ekonomi dan ketenagakerjaan , pendidikan, kesehatan, prasarana dasar, dan ketahanan pangan , sebagaimana Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 16 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013-2017.

Sebagai wujud pertanggungjawaban TKPK terhadap tugas koordinasi, dan pengendalian penanggulangan kemiskinan di daerah perlu dilaksanakan evaluasi terhadap usaha-usaha penanggulangan kemiskinan di daerah. Sebagai tindak lanjut, disusunlah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 guna melihat perkembangan pelaksanaan dan capaian penanggulangan kemiskinan di daerah serta untuk menjelaskan kinerja TKPK dalam menyelenggarakan tugas koordinasi penanggulangan kemiskinan dan pengendalian pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD) Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2018 diharapkan bisa menjadi acuan dalam rangka menyusun perencanaan dalam bidang penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penanggulangan kemiskinan di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang.

Karang Baru, November 2018
Kepala Bappeda Kab. Aceh Tamiang

(Ir. Adi Darma, M.Si)
Pembina Utama Muda
NIP. 19650920 199503 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kemiskinan masih menjadi isu utama dalam pembangunan sosial ekonomi di Indonesia termasuk di Kabupaten Aceh Tamiang. Upaya mengatasi kemiskinan telah dilakukan antara lain dengan menyediakan beberapa kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan pembangunan pertanian. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Tamiang menunjukkan kecenderungan penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 sampai dengan 2016 secara persentase terus mengalami penurunan dengan persentase tahun 2013 sebesar 15,43% (40.800 jiwa) turun menjadi 14,51% namun di tahun 2017 naik persentase maupun jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 14,69% (42.010 jiwa). Meskipun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Tamiang telah mengalami penurunan namun pada hakekatnya jumlahnya masih relatif tinggi, hal ini mengharuskan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dengan kerja keras dan serius dari seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah Daerah maupun seluruh komponen (Masyarakat, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, LSM dan lain-lain).

Kemiskinan adalah isu yang kompleks dan multidimensional, karena banyaknya pendekatan yang dilakukan terhadap kondisi yang disebut miskin, maka banyak definisi tentang kemiskinan. Menurut Bank Dunia (2000), pada umumnya definisi kemiskinan mengacu kepada ide dasar bahwa kemiskinan adalah masalah “kekurangan” dalam “kesejahteraan”. Dilihat dari posisi relatif, tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2016 sebesar 14,69% berada dibawah rata-rata provinsi (15,92%) dan diatas rata-rata nasional (10,12%).

Dibidang ketenagakerjaan Kabupaten Aceh tamiang Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Aceh Tamiang relatif tinggi, karena angkanya diatas 5 persen. TPT merupakan perbandingan penduduk yang mencari kerja terhadap total angkatan kerja. Pada tahun 2017 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Aceh Tamiang 5,43% dibawah rata-rata Provinsi Aceh 6,57%, yang mengalami penurunan dari tingkat pengangguran.

Kondisi ini jika dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah sekitar 16.761 jiwa atau sekitar 14,03% terhadap angkatan kerja.

Di bidang Pendidikan untuk Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI di Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2017 sebesar 98,12%, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs sebesar 89,36%, Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA sebesar 66,23%. Pada tahun 2017 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI di Kabupaten Aceh Tamiang sebesar 107,95%, APK SMP/MTs sebesar 101,47%, APK SMA/MA tahun 2016 sebesar 87,46% berada dibawah rata-rata Propinsi Aceh 87,47% dan di bawah rata-rata Nasional 80,89% ,namun di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 80,04% . Angka Putus Sekolah (APS) juga sangat mempegaruhi tingkat kemiskinan masyarakat Karena Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI di Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif dengan persentase ditahun 2012 sebesar 0,12% naik hingga 0,21% pada tahun 2016. Angka ini menunjukkan bahwa angka putus sekolah di Kabupaten Aceh Tamiang memburuk.

Pada bidang kesehatan ada beberapa indikator yang digunakan yaitu Indikator-indikator tersebut adalah kondisi Mortalitas (Angka Kematian), Morbiditas (Angka Kesakitan) dan Status Gizi. Derajat kesehatan dipengaruhi 4 faktor utama yaitu: lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan genetika. Perkembangan akses rumah tangga terhadap air minum layak Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2012-2016 konsisten membaik, yaitu pada tahun 2012 sebesar 25,54% naik menjadi 64,49% pada tahun 2016, namun di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 53,68%.

Untuk bidang Prasarana Dasar Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih di Kabupaten Aceh Tamiang sebesar 78,01 persen berada di atas rata-rata Provinsi sebesar 62,68 persen dan sedikit lebih buruk dari Nasional 67,8%.

Adapun tugas dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Aceh Tamiang.

Monitoring dan Evaluasi program penanggulangan kemiskinan pada lembaga pemerintah dilakukan secara internal oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPK) terkait untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kebijakan dan program, serta mengukur dampak kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan.

Berikut beberapa program yang berdampak untuk menanggulangi kemiskinan dari beberapa SKPD yang terkait diantaranya :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Program Kesejahteraan Petani yang dilakukan oleh Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan dilakukan oleh Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang.
4. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.
5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.
6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang dilaksanakan di Bagian Ekonomi Sekretariat Kabupaten Aceh Tamiang yang meliputi kegiatan Monitoring Pelaksanaan Raskin / Rastra KPM, Monitoring pelaksanaan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg dan Pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida.
7. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I.....	1
I. PENDAHULUAN	1
I.1 LATAR BELAKANG	1
I.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
I.2.1 Maksud.....	2
I.2.2 Tujuan	3
I.3 LANDASAN HUKUM	4
I.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	4
BAB II	5
II. PROFIL KEMISKINAN DAERAH.....	5
II.1 KONDISI KEMISKINAN DAERAH	5
II.1.1 Geografi.....	5
II.1.2 Demografi.....	7
II.2 Kondisi Kemiskinan Multidimensial.....	8
II.2.1 Dimensi Ekonomi dan Ketenagakerjaan.....	10
II.2.2 Dimensi Pendidikan	20
II.2.3 Dimensi Kesehatan.....	30
II.2.4 Dimensi Prasarana Dasar	36
BAB III.....	40
III. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN.....	40
III.1 Regulasi Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan	40
III.2 Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	44
III.2.1 Sinkronisasi antar dokumen perencanaan	44
III.3 Evaluasi APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan	59
III.3.1 Analisis Pendapatan Daerah	59
III.3.2 Analisis Belanja Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan	61
BAB IV.....	71
IV. KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	71
IV.1 Kelembagaan TKPK.....	71
IV.2 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.....	72
IV.3 Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan	74
IV.3.1 Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan	74
IV.3.2 Penanganan Pengaduan Masyarakat.....	76
BAB V.....	77
V. PENUTUP.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Posisi Relatif Garis Kemiskinan Provinsi Aceh Tahun 2017.....	9
Gambar II.2 Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010-2017.....	10
Gambar II.3 Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017.....	11
Gambar II.4 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010-2017.....	11
Gambar II.5 Analisis Efektivitas Tingkat Kemiskinan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 - 2017.....	12
Gambar II.6 Relevansi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 - 2017.....	12
Gambar II.7 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh Tahun 2017.....	13
Gambar II.8 Perkembangan dan Analisis Relevansi Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 - 2017.....	13
Gambar II.9 Analisis Efektivitas Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2010 - 2017.....	14
Gambar II.10 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh Tahun 2017.....	15
Gambar II.11 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010-2017.....	15
Gambar II.12 Analisis Efektivitas Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2010-2017.....	16
Gambar II.13 Analisis Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2010-2017.....	16
Gambar II.14 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh Tahun 2017.....	17
Gambar II.15 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 - 2017.....	17
Gambar II.16 Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2010-2017.....	18
Gambar II.17 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017.....	19
Gambar II.18 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Aceh Tamiang, Tahun 2012-2017.....	19
Gambar II.19 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2010-2017.....	20
Gambar II.20 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2010-2017.....	21
Gambar II.21 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2010-2017.....	21
Gambar II.22 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2010-2017.....	22
Gambar II.23 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2010-2017.....	23
Gambar II.24 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2010-2017.....	23
Gambar II.25 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2010-2017.....	24
Gambar II.26 Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Provinsi Aceh Tahun 2017.....	24
Gambar II.27 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2010-2017.....	25
Gambar II.28 Perkembangan Angka Putus Sekolah Usia 7-12 (%) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2012-2016.....	26

Gambar II.29	Perkembangan Angka Putus Sekolah Usia 13-15 (%) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2012-2016	26
Gambar II.30	Posisi Relatif Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+ (%) Provinsi Aceh Tahun 2016	27
Gambar II.31	Perkembangan Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+ (%) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2012-2017.....	28
Gambar II.32	Perkembangan Rasio Siswa/Guru SD/MI Kab. Aceh Tamiang Tahun 2012-2016.....	28
Gambar II.33	Perkembangan Rasio Siswa/ Guru SMP/MTs (Siswa) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2012-2016	29
Gambar II.34	Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012-2017.....	31
Gambar II.35	Analisis Efektivitas Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012-2017.....	31
Gambar II.36	Perkembangan Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kab. Aceh Tamiang, Tahun 2012-2017.....	32
Gambar II.37	Analisis efektivitas Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1000 KH) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2012-2017.....	33
Gambar II.38	Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2012-2017	34
Gambar II.39	Analisis Efektivitas Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 KH) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2012-2017	34
Gambar II.40	Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2012-2016.....	35
Gambar II.41	Analisis Efektivitas Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2012-2016	35
Gambar II.42	Perkembangan Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih Kab. Aceh Tamiang Tahun 2012-2017.....	36
Gambar II.43	Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2012-2017.....	37
Gambar II.44	Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Provinsi Aceh 2016	37
Gambar II.45	Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2012-2016.....	38
Gambar II.46	Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Provinsi Aceh Tahun 2016.....	38
Gambar II.47	Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2012-2016.....	39
Gambar III.1	Proporsi Belanja Sektor Ekonomi dan Ketenagakerjaan terhadap Total Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang.....	62
Gambar III.2	Proporsi Total Belanja Sektor Ekonomi dan Tenaga Kerja di Kabupaten Aceh Tamiang	63
Gambar III.3	Efektifitas Belanja Sektor Ekonomi dan Ketenagakerjaan terhadap Angka Kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang.....	64
Gambar III.4	Proporsi Total Belanja Daerah dengan Total Belanja Sektor Pendidikan	65
Gambar III.5	Efektifitas Anggaran Belanja Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun terhadap APM SD/MI Di Kabupaten Aceh Tamiang	66
Gambar III.6	Proporsi Total Belanja Sektor Kesehatan terhadap Total Belanja APBD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015-2017.....	67
Gambar III.7	Efektifitas Anggaran Belanja Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak terhadap AKI, AKB, dan AKBA.....	68
Gambar III.8	Proporsi Total Belanja Sektor Prasarana Dasar terhadap Total Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang.....	69
Gambar III.9	Efektifitas Anggaran Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum dan Air Limbah terhadap Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Ibu Kota Kecamatan, Luas Wilayah dan Jumlah Kampung di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017.....	6
Tabel II.2 Distribusi Penggunaan Lahan di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017.....	6
Tabel II.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Tamiang Menurut Kecamatan	7
Tabel II.4 Jumlah Penduduk dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013-2017.....	8
Tabel II.5 Indikator-indikator prioritas di bidang pendidikan yang menjadi determinan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017	29
Tabel III.1 Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	44
Tabel III.2 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi SKPK.....	59
Tabel III.3 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang 2015 - 2017.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Kemiskinan selalu menjadi prioritas utama untuk ditanggulangi oleh setiap Kepala Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam sesuai dengan Misi Bupati Kabupaten Aceh Tamiang nomor 3 dan 4 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan optimalisasi pemanfaatan potensi unggulan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kemiskinan bersifat multidimensional yang merupakan permasalahan senya pihak. kemiskinan berdampak sistemik, menyangkut segala sisi kehidupan. Sehingga jika tidak segera diatasi, maka permasalahan kemiskinan tersebut akan memperparah permasalahan lain yang juga sedang dalam penyelesaian. Kemiskinan bukan sekedar rendahnya ekonomi (Pendapatan yang rendah) tetapi juga mencakup kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin. Dan keterbatasan akses masyarakat miskin dalam penentuan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka. Oleh sebab itu pemecahan masalah kemiskinan tidak lagi dapat dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan sektoran yang terpusat, seragam dan berjangka pendek.

Sedemikian pentingnya program kegiatan yang berbasis pada penanggulangan kemiskinan, sehingga Pemerintah menetapkan Kebijakan Prioritas Penanggulangan Kemiskinan dalam Pembangunan Nasional yang dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025, yang pelaksanaannya dijabarkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahunan. Di dalam RPJMN ditargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 8-10 persen pada tahun 2019.

Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2017 sebanyak 287.007 jiwa yang terdiri atas 144.926 jiwa laki-laki dan 142.081 jiwa perempuan. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata 147 jiwa per-km² di tahun 2017, dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Kota Kuala Simpang yaitu 4.635 jiwa per-km². Rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2017 sebesar 1,44%. Secara umum jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tamiang sejak tahun 2013 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Tamiang berjumlah 287.007 jiwa dengan jumlah penduduk miskin berjumlah 42.010 jiwa.

Menanggulangi permasalahan kemiskinan maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tersebut diperlukan berbagai upaya dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, salah satunya dengan membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagai inti penggerak kegiatan berbasis penanggulangan kemiskinan di tingkat Pemerintah Pusat dan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai penerus kebijakan dan menjalankan tugas koordinasi serta pengendalian seperti Untuk yang telah diuraikan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

I.2.1 Maksud

Maksud penyusunan Laporan Pencapaian Penanggulangan kemiskinan Daerah (LP2KD) adalah untuk mengukur capaian kinerja kolektif lintas SKPD yang di koordinasikan oleh TKPK dalam isu penanggulangan kemiskinan. Isu multi dimensi ini akan di terjemahkan kedalam beberapa indikator ukur utama kemiskinan dan pengangguran, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar dan ketahanan pangan. Melalui laporan ini akan tergambar permasalahan yang ada

serta prioritas penyelesaiannya yang akan di gambarkan oleh capaian indikator pendukung.

I.2.2 Tujuan

TKPK sebagai Tim Koordinasi yang menjadi motor penggerak sekaligus bertugas melakukan monitoring dan pengendali seluruh kegiatan yang berbasis pada penanggulangan kemiskinan, menjadikan TKPK sebagai bagian terpenting dalam pengentasan kemiskinan. Sebagaimana tugas pokok dan fungsi TKPK, maka kegiatan yang telah dilaksanakan selama ini adalah memonitoring dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang konsen terhadap pengendalian kemiskinan. TKPK Kabupaten Aceh Tamiang dalam melaksanakan tugas koordinasi penanggulangan kemiskinan mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan SPKD Kabupaten Aceh Tamiang sebagai dasar penyusunan RPJMD Kabupaten Aceh Tamiang di bidang penanggulangan kemiskinan;
- b. Pengkoordinasian SKPK atau gabungan SKPK bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPK;
- c. Pengkoordinasian SKPK atau gabungan SKPK bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPK;
- d. Pengkoordinasian SKPK atau gabungan SKPK bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPK; dan
- e. Pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

TKPK Kabupaten Aceh Tamiang dalam melaksanakan tugas mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan mempunyai fungsi:

- a. Pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;

- c. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- d. Pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- e. Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
- f. Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan TKPK Provinsi.

I.3 LANDASAN HUKUM

1. RPJMN 2005 -2019;
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010;
4. Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 515 Tahun 2017.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

1. BAB 1 : PENDAHULUAN
2. BAB 2 : KONDISI KEMISKINAN DI DAERAH
3. BAB 3 : ANGGARAN BELANJA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
4. BAB 4 : KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
5. BAB 5 : KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH
6. BAB 6 : REKOMENDASI

BAB II

PROFIL KEMISKINAN DAERAH

II.1 KONDISI KEMISKINAN DAERAH

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu, keberhasilan pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan merupakan bagian dari keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga pengentasan kemiskinan menjadi prioritas yang paling utama dalam melaksanakan pembangunan. Penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mengurangi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

II.1.1 Geografi

Kabupaten Aceh Tamiang berada di jalur Timur Sumatera yang strategis yang berjarak lebih kurang 236 km dari Kota Medan Ibukota Provinsi Sumatera Utara, dan berjarak 470 km dari Kota Banda Aceh ibukota Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Tamiang terletak pada 030 53' 18,81" - 040 32' 56,76" Lintang Utara, 970 43' 41,51" - 980 14' 45,41" Bujur Timur, dengan luas wilayah 1.957,02 km² yang sebagian besar terdiri dari wilayah perbukitan. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara dan merupakan pintu gerbang memasuki Provinsi Aceh. Secara geografis batas-batas wilayah Kabupaten Aceh Tamiang sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa;
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tenggara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka.

Luas wilayah Kabupaten Aceh Tamiang 1.957,02 km² yang terdiri dari 12 Kecamatan dengan 213 Kampung dan 705 dusun, dapat kita lihat dari tabel berikut :

Tabel II.1 Ibu Kota Kecamatan, Luas Wilayah dan Jumlah Kampung di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kab. (Km)	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Kampung
1	Tamiang Hulu	Pulo Tiga	34	194,63	9
2	Bandar Pusaka	Babo	33	252,37	15
3	Kejuruan Muda	Sungai Liput	11	124,48	15
4	Tenggulun	Simpang Kiri	28	295,55	5
5	Rantau	Alur Cucur	15	51,71	16
6	Kota Kuala Simpang	Kuala Simpang	3	4,48	5
7	Seruway	Tangsi Lama	24	188,49	24
8	Bendahara	Sungai Iyu	24	132,53	33
9	Banda Mulia	Telaga Meuku	25	48,27	10
10	Karang Baru	Karang Baru	5	139,45	31
11	Sekerak	Sekerak Kanan	6	257,95	14
12	Manyak Payed	Tualang Cut	17	267,11	36
				1.957,02	213

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tamiang, 2018

Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari beberapa jenis penggunaan lahan meliputi hutan, perkebunan, sawah, pemukiman dan tambak dengan rincian jenis sebagai berikut :

Tabel II.2 Distribusi Penggunaan Lahan di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017

No	Jenis Penggunaan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1	Hutan	40.789,50	20,84
2	Perkebunan Perusahaan	46.785,00	23,91
3	Perkebunan Rakyat	44.172,00	22,58
4	Pemukiman	13.287,00	6,79
5	Pertanian Lahan Kering/Ladang	17.798,25	9,13
6	Sawah	16.238,00	9,09
7	Rawa	1.018,00	0,52
8	Padang Rumput	296,00	0,15
9	Kolam/Tambak	3.602,50	1,84
10	Tanah Terbuka/Lahan Kosong	6.108,50	3,12
11	Lainnya	5.607,75	2,86
	Total	195.702,50	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tamiang, 2018

Penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Tamiang menurut BPS Tahun 2016, didominasi oleh perkebunan seluas 46.788 Ha atau sebesar 23,91% dari total

luas wilayah Kabupaten Aceh Tamiang dan untuk permukiman/tempat tinggal hanya 13.287 Ha atau sebesar 6,79%.

II.1.2 Demografi

Tabel II.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Tamiang Menurut Kecamatan

No	Kecamatan/ Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
1	Tamiang Hulu	18.197	18.740	19.100	19.400	19.665
2	Bandar Pusaka	12.132	12.471	12.663	12.841	12.995
3	Kejuruan Muda	33.361	34.365	35.312	35.939	36.504
4	Tenggulun	17.118	17.596	17.763	18.003	18.210
5	Rantau	34.487	35.559	36.490	37.132	37.709
6	Kota Kuala Simpang	19.019	19.621	20.075	20.438	20.765
7	Seruway	24.799	25.513	26.217	26.672	27.081
8	Bendahara	19.473	20.027	20.463	20.794	21.087
9	Banda Mulia	11.153	11.485	11.663	11.835	11.986
10	Karang Baru	38.036	39.179	40.110	40.796	41.401
11	Sekerak	6.289	6.464	6.630	6.733	6.824
12	Manyak Payed	30.356	3.208	31.838	32.338	32.780
Jumlah		264 420	272 228	278.324	282.921	287.007

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tamiang, 2018

Tingkat kepadatan penduduk rata-rata 147 jiwa per-km² di tahun 2017, dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Kota Kuala Simpang yaitu 4.635 jiwa per-km². Rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2017 sebesar 1,44%

Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2017 sebanyak 287.007 jiwa yang terdiri atas 144.926 jiwa laki-laki dan 142.081 jiwa perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki masih mendominasi dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Penduduk Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2016 mencapai 102%, yang berarti bahwa banyaknya penduduk laki-laki per 100 jiwa penduduk perempuan adalah 102 jiwa.

Secara umum jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tamiang sejak tahun 2013 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 jumlah penduduk di

Kabupaten Aceh Tamiang berjumlah 287.007 jiwa dengan jumlah penduduk miskin berjumlah 42.010 jiwa.

Tabel II.4 Jumlah Penduduk dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Penduduk Miskin (jiwa)	Persentase
2013	264.420	40.800	15,43
2014	272.228	39.900	14,58
2015	278.324	40.380	14,57
2016	282.921	40.880	14,51
2017	287.007	42.010	14,69

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tamiang, 2018

Jumlah penduduk miskin di Aceh Tamiang menunjukkan kecenderungan penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 sampai dengan 2016 secara persentase terus mengalami penurunan dengan persentase tahun 2013 sebesar 15,43% turun menjadi 14,51%, namun di tahun 2017 baik persentase maupun jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 14,69% (42.010 jiwa).

II.2 Kondisi Kemiskinan Multidimensial

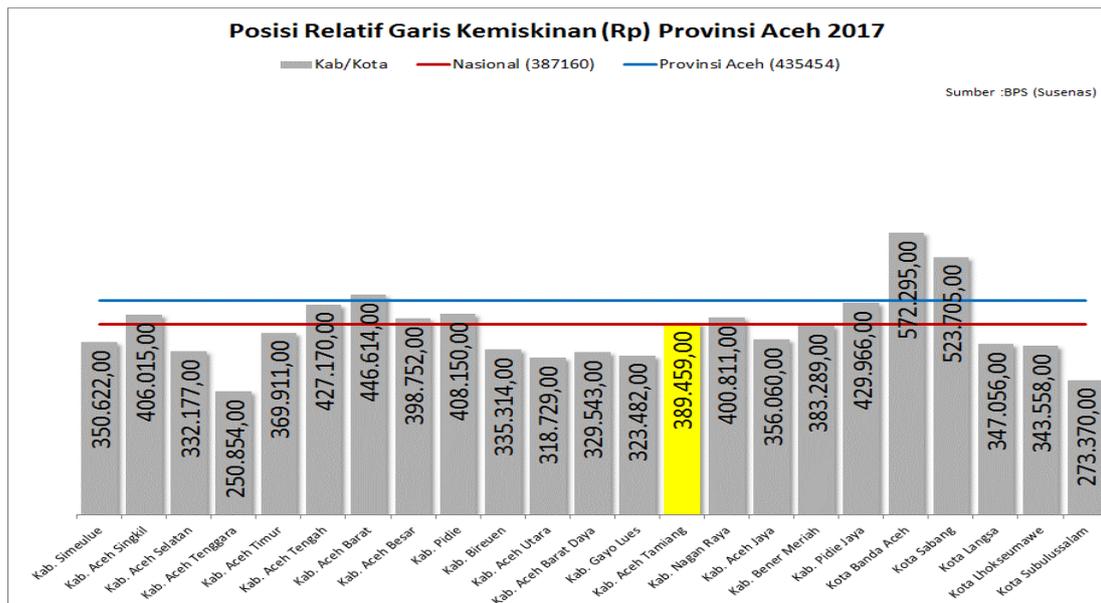
Konsep atau definisi kemiskinan yang digunakan di Indonesia sesuai dengan konsep Badan Pusat Statistik adalah Kemiskinan Absolut yaitu kemiskinan yang ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti Pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan Pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum/ kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya dibawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin. Selain kemiskinan absolut, ada 4 jenis kemiskinan yaitu:

1. Kemiskinan relatif, kemiskinan relatif muncul jika kondisi seseorang atau sekelompok orang dibandingkan dengan kondisi orang lain dalam suatu daerah;
2. Kemiskinan Struktural, Kemiskinan struktural lebih menuju kepada orang atau sekelompok orang yang tetap miskin atau menjadi miskin karena

- struktur masyarakatnya yang timpang, yang tidak menguntungkan bagi golongan yang lemah;
3. Kemiskinan Situsional atau kemiskinan natural, kemiskinan situasional terjadi di daerah-daerah yang kurang menguntungkan dan oleh karenanya menjadi miskin;
 4. Kemiskinan kultural, kemiskinan penduduk terjadi karena kultur atau budaya masyarakatnya yang sudah turun temurun yang membuat mereka menjadi miskin.

Dengan pendekatan ini kemudian ditentukan Garis Kemiskinan (yang merupakan gabungan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan non-Makanan), penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan penduduk miskin. Cara penentuan penduduk miskin semacam ini disebut penentuan kemiskinan absolut. Garis Kemiskinan Kabupaten Aceh Tamiang dapat dilihat pada gambar berikut.

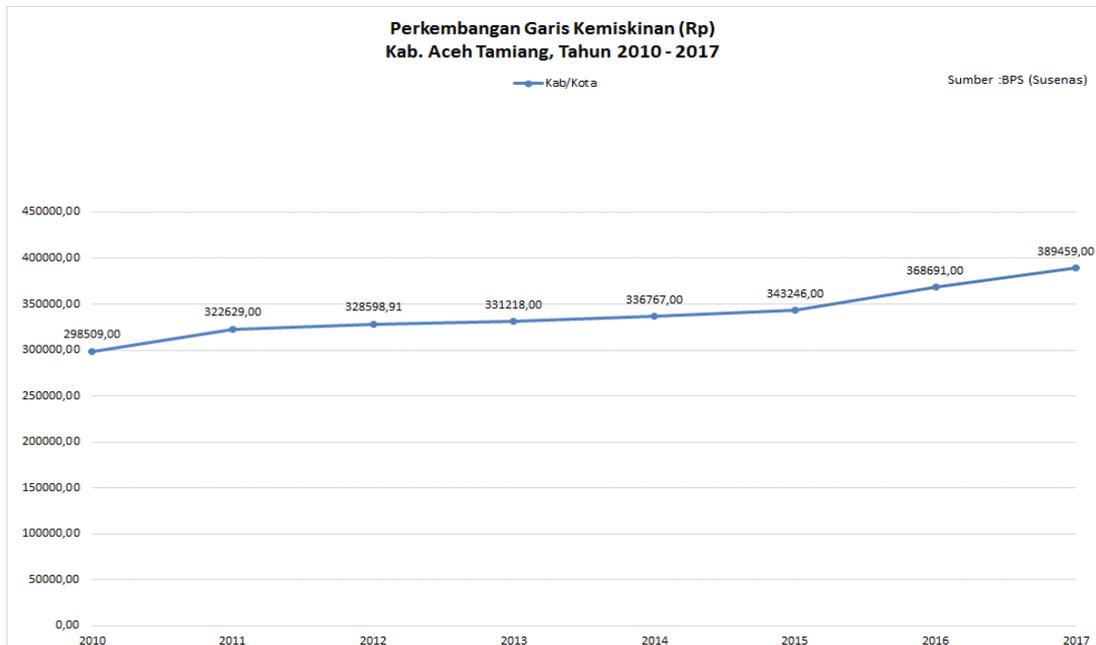
Gambar II.1 Posisi Relatif Garis Kemiskinan Provinsi Aceh Tahun 2017



Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa garis kemiskinan Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2017 sebesar (Rp. 389.459,00) berada di bawah rata-rata Provinsi Aceh (Rp. 435.454,00) dan sedikit diatas rata-rata nasiona sebesar (Rp.387.160,00). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendapatan

minimum per bulan yang harus dicapai penduduk untuk dapat hidup layak adalah sebesar 389.459 rupiah pada tahun 2017.

Gambar II.2 Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010-2017



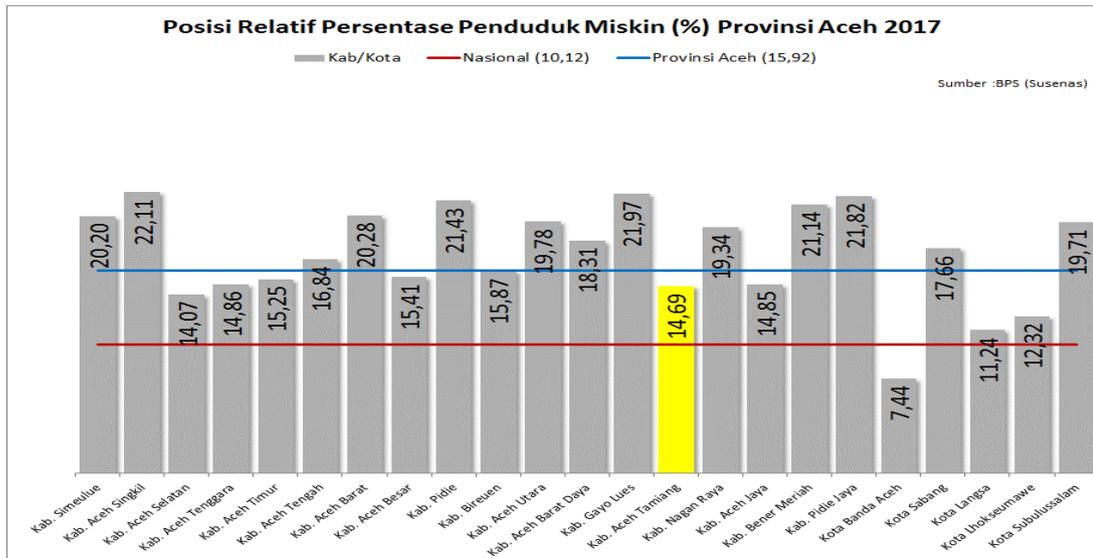
Perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang dari tahun 2010 sampai dengan 2017 cenderung mengalami kenaikan.

II.2.1 Dimensi Ekonomi dan Ketenagakerjaan

II.2.1.1 Persentase Penduduk Miskin (P0)

Dilihat dari posisi relatif, tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2016 sebesar 14,69% berada dibawah rata-rata provinsi (15,92%) dan diatas rata-rata nasional (10,12%).

Gambar II.3 Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017



Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang dari Tahun 2010 sampai dengan 2016 mengalami penurunan menjadi 14,51%. Namun di tahun 2017 sedikit mengalami kenaikan menjadi 14,69%.

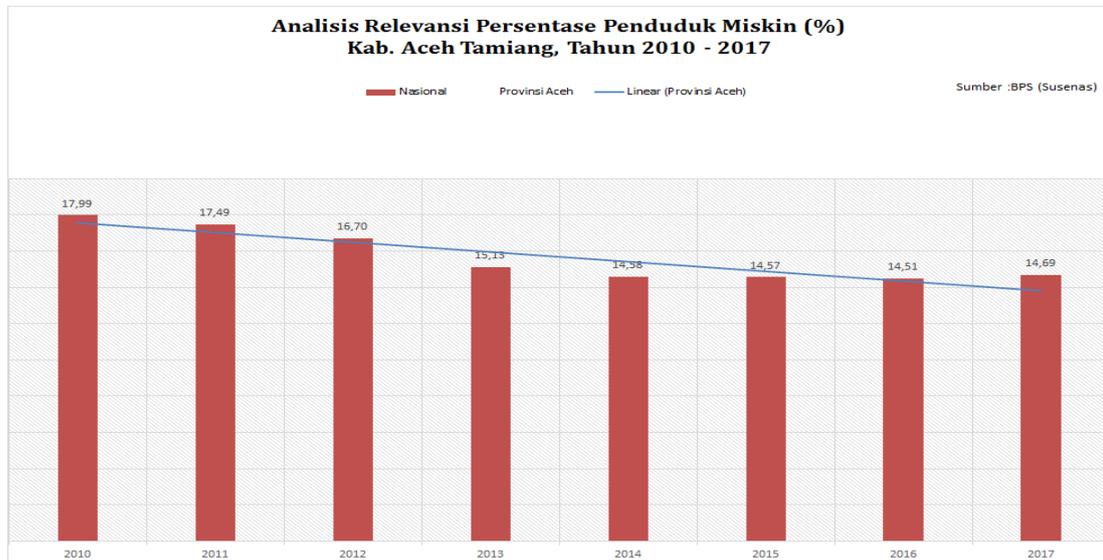
Gambar II.4 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010-2017



Analisis efektivitas persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2012 - 2016 cenderung menurun, meskipun penurunannya kurang efektif. Hal ini dapat kita lihat dari semakin menurunnya tingkat

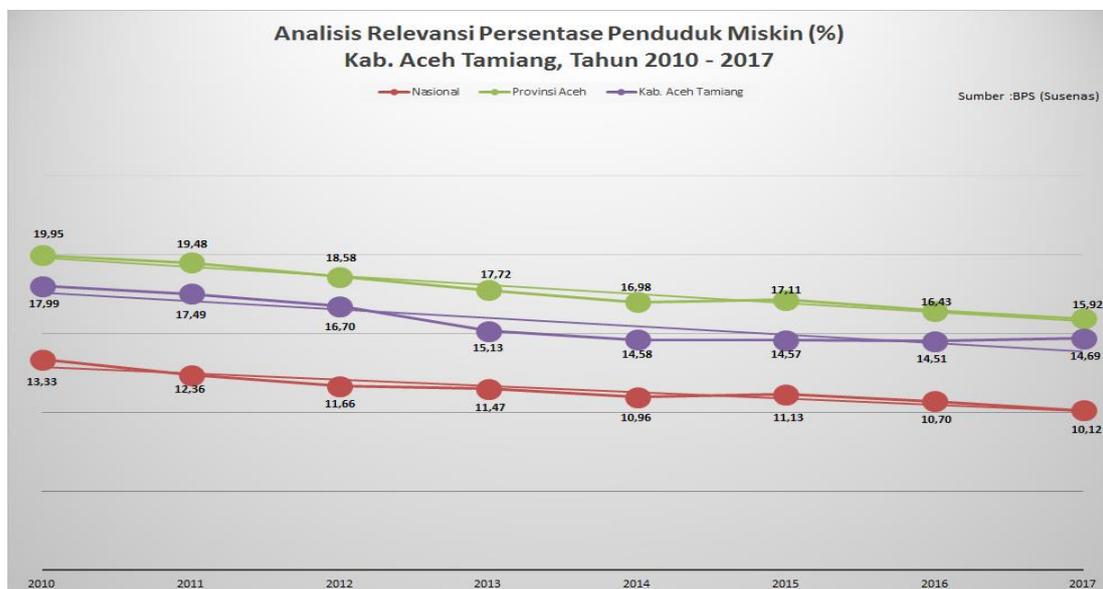
kemiskinan dari 16,70 persen pada tahun 2012 menjadi 14,51 persen pada tahun 2016 dan sedikit mengalami kenaikan di tahun 2017. Dilihat dari trendlinenya penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang cenderung melambat.

Gambar II.5 Analisis Efektivitas Tingkat Kemiskinan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 – 2017



Persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2012 - 2017 dengan tingkat kemiskinan Provinsi Aceh dan Nasional penurunannya relevan.

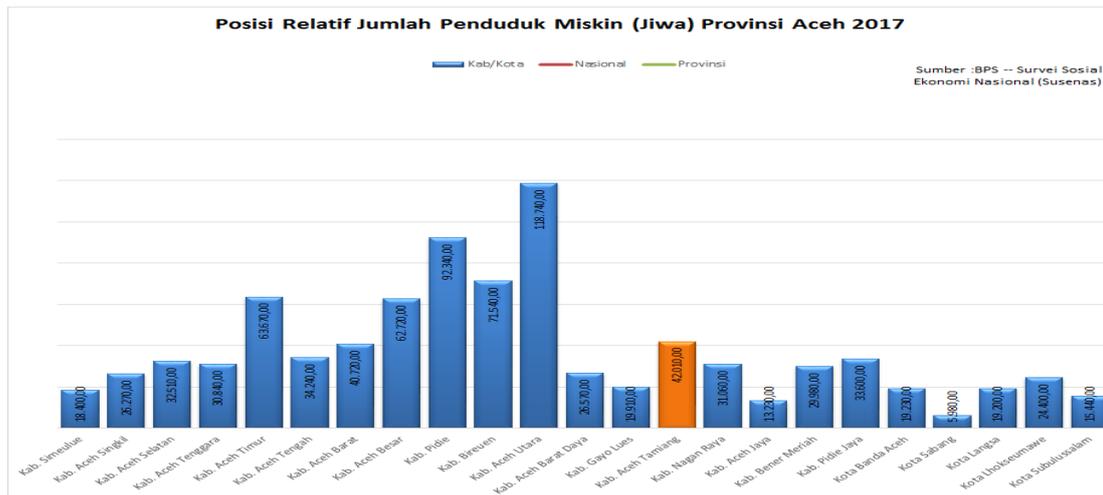
Gambar II.6 Relevansi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 – 2017



II.2.1.2 Jumlah Penduduk Miskin

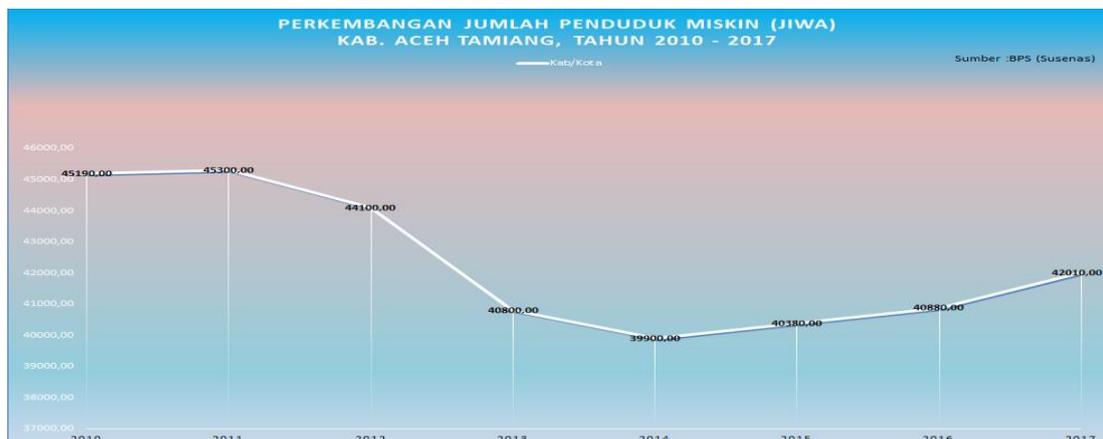
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2017 sebesar 42.010 jiwa. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Tamiang menempati urutan tertinggi keenam di Provinsi Aceh. Walaupun secara persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang tergolong rendah namun dilihat dari jumlah penduduk miskin tergolong tinggi.

Gambar II.7 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh Tahun 2017



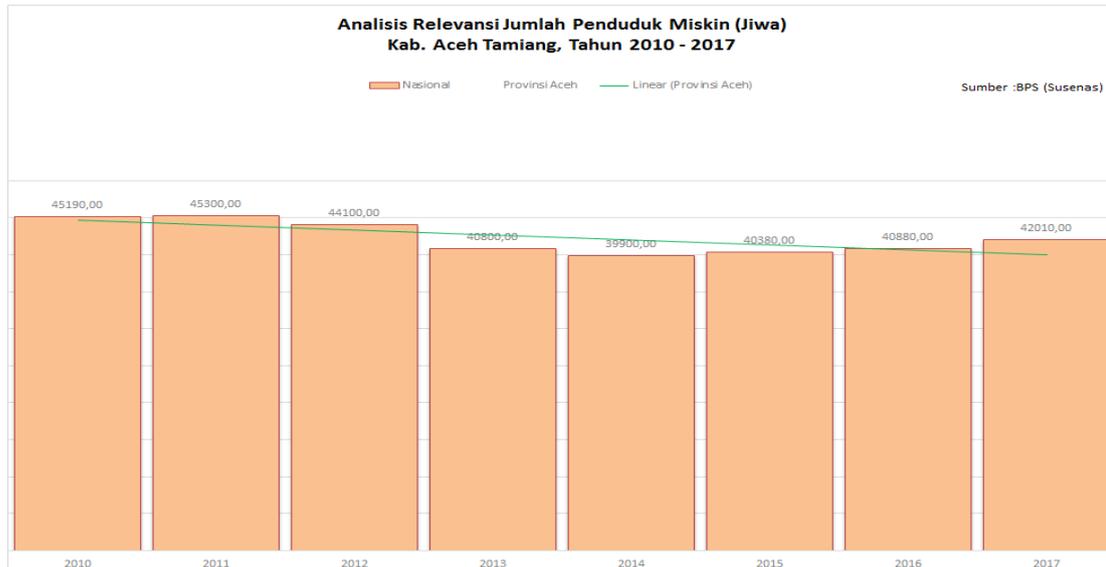
Dilihat dari perkembangannya, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Tamiang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin Kabupaten Aceh Tamiang sebesar 42.010 jiwa bertambah sebesar 1.130 jiwa dibanding tahun 2016.

Gambar II.8 Perkembangan dan Analisis Relevansi Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 - 2017



Analisis efektivitas penduduk miskin di Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2010 - 2017 dapat dikatakan bahwa kabupaten Aceh Tamiang belum efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan, hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin yang terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017 mencapai angka 42.010 jiwa.

Gambar II.9 Analisis Efektivitas Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2010 - 2017

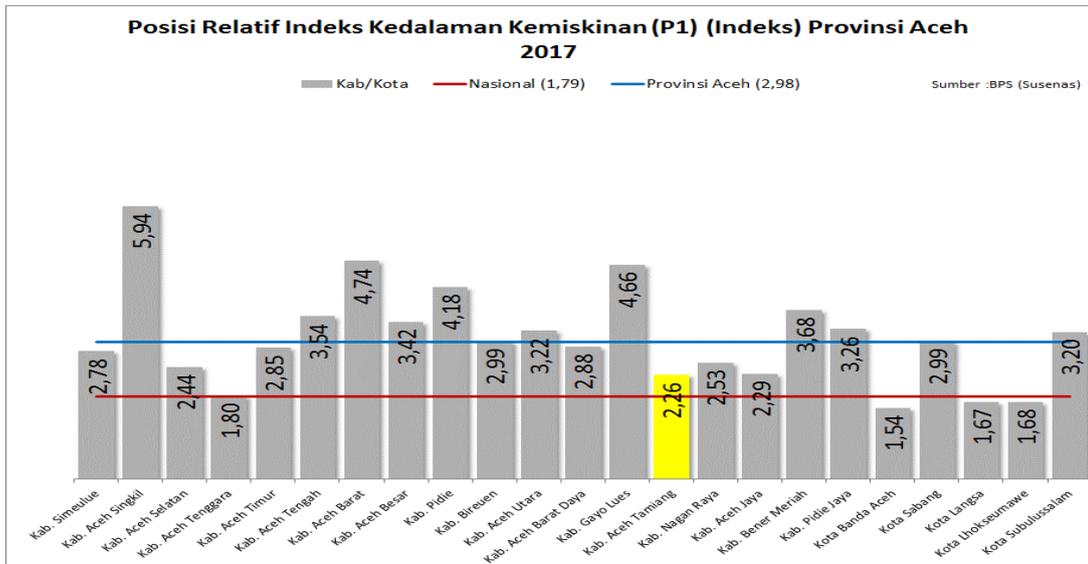


Dilihat dari trendlinenya penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang cenderung melambat dan mengalami kenaikan.

II.2.1.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan (GK). Semakin tinggi nilai P1 maka semakin tinggi kesenjangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang.

Gambar II.10 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh Tahun 2017



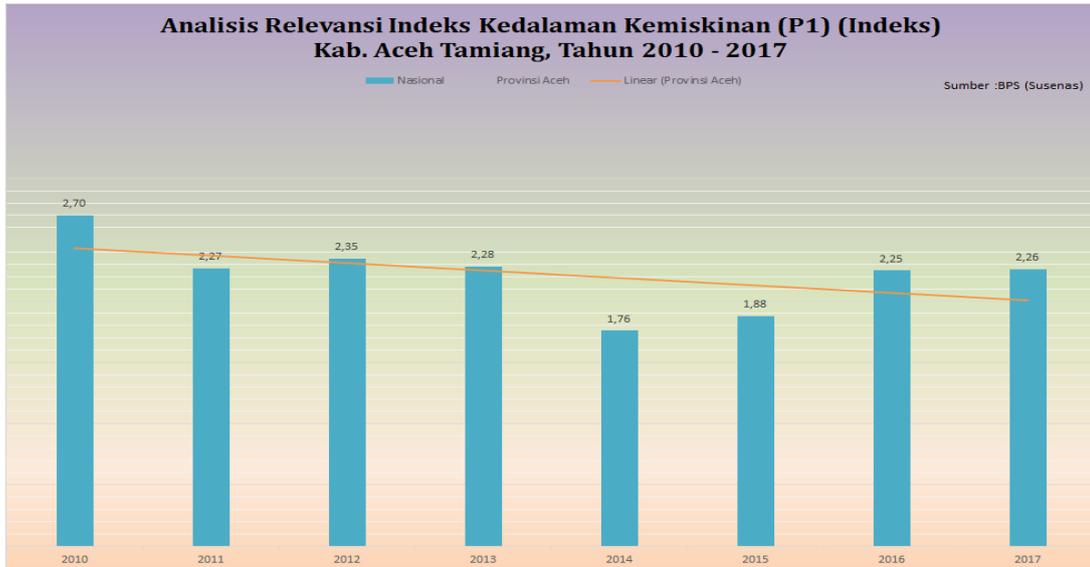
Indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Kabupaten Aceh Tamiang sebesar 2,26% berada di atas rata-rata Nasional (1,79%) dan di bawah rata-rata Provinsi (2,98%).

Gambar II.11 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010-2017



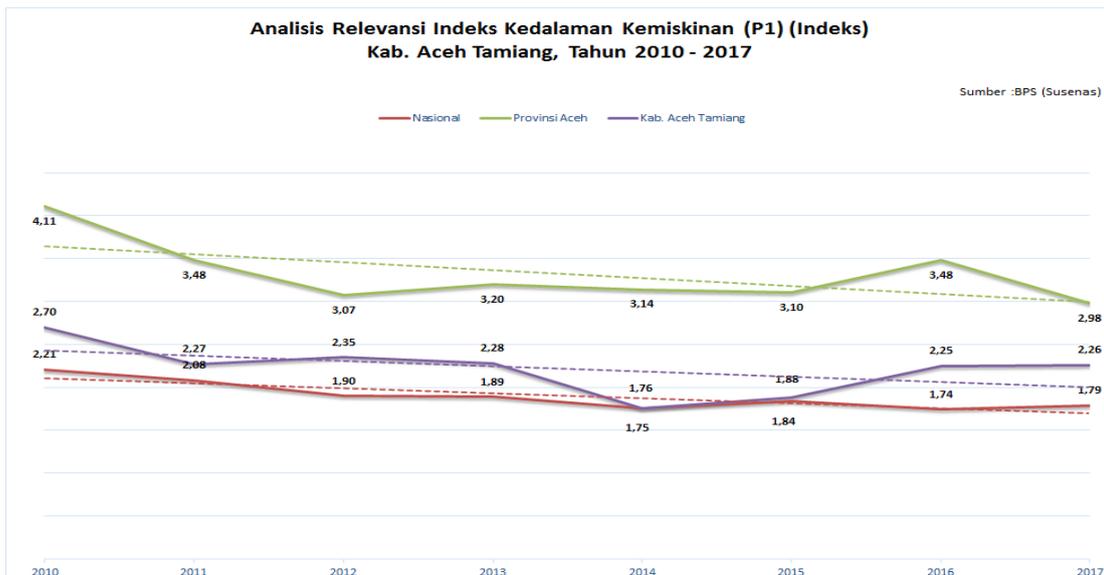
Berdasarkan gambar diatas perkembangan indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Aceh Tamiang dari tahun 2010 sampai dengan 2017 cenderung fluktuatif.

Gambar II.12 Analisis Efektivitas Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2010-2017



Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa analisis efektivitas indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Aceh Tamiang cenderung mengalami kenaikan.

Gambar II.13 Analisis Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2010-2017



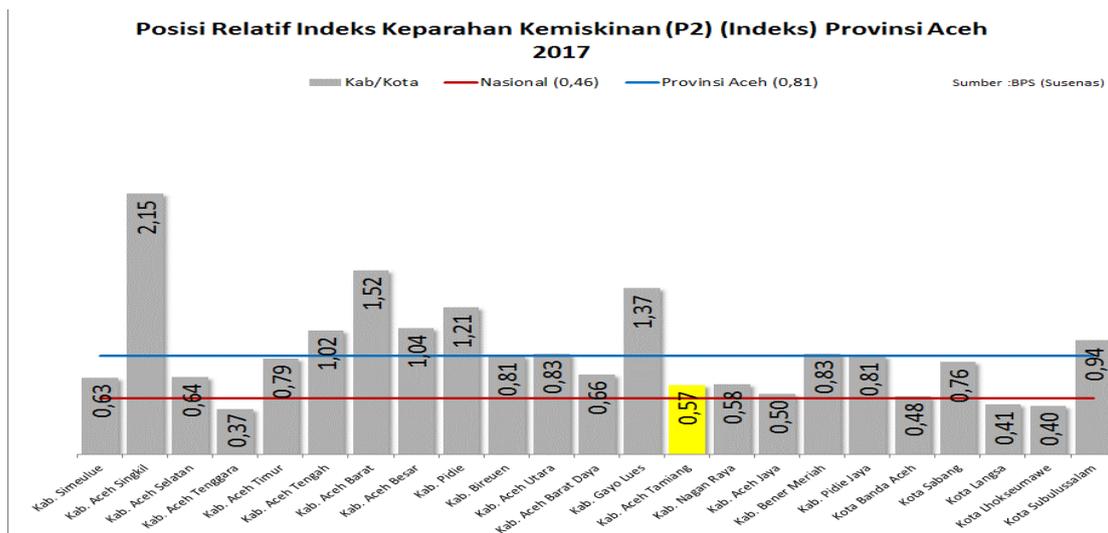
Relevansi indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Aceh Tamiang dari tahun 2016 relevan dengan Provinsi namun di tahun 2017 tidak relevan dengan Nasional dan Provinsi.

II.2.1.4 Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) adalah distribusi peyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P2 maka semakin tinggi intensitas kemiskinan.

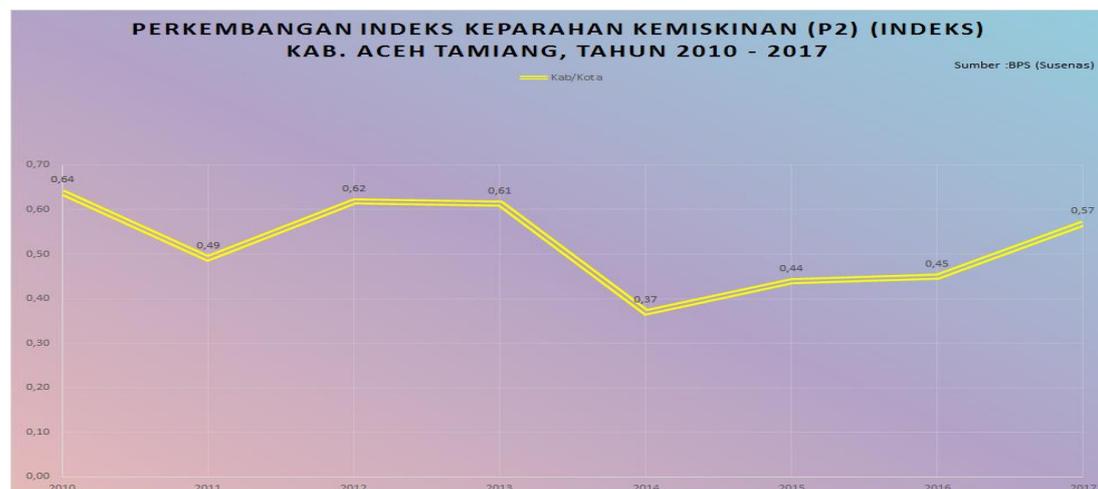
Pada tahun 2017, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Aceh Tamiang (0,57%) berada di bawah rata-rata Provinsi (0,81%) dan di bawah rata-rata Nasional (0,46%).

Gambar II.14 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh Tahun 2017



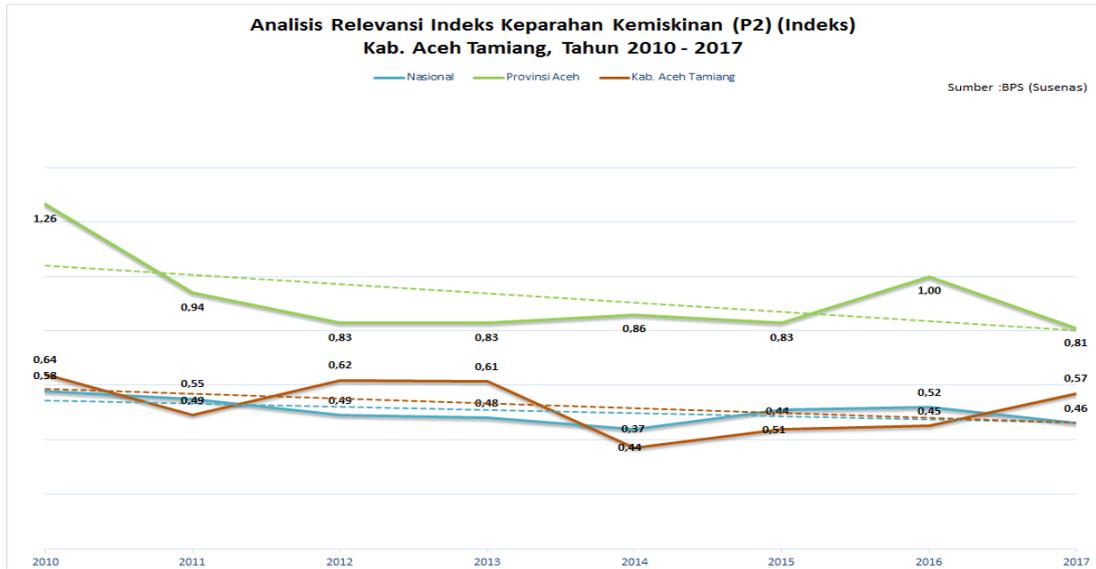
Selama periode 2010-2017 perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) cenderung fluktuatif.

Gambar II.15 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 - 2017



Perkembangan indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2010 0.64% turun menjadi 0.37% di tahun 2014 dan mengalami kenaikan dari tahun 2015-2017.

Gambar II.16 Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2010-2017

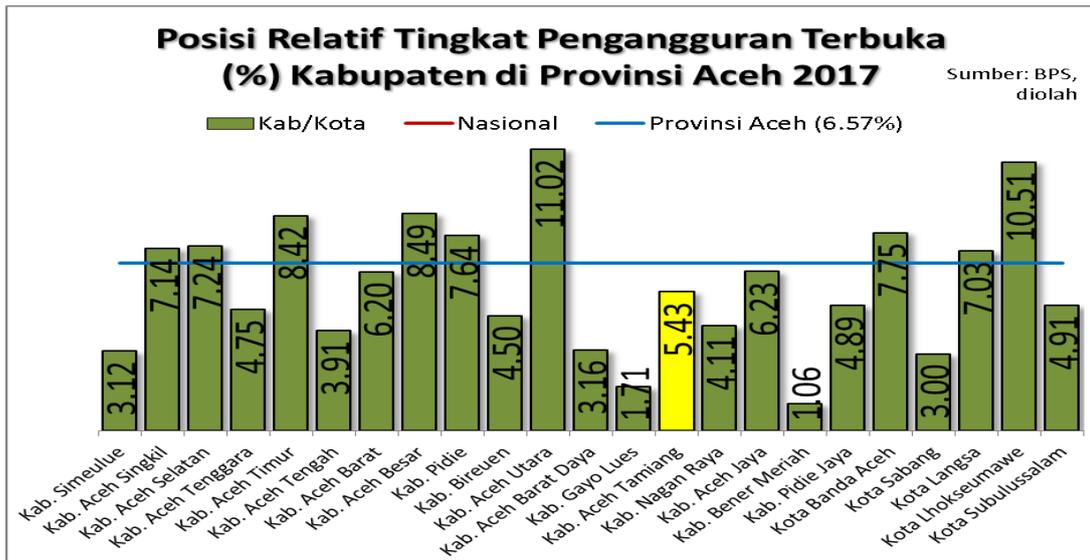


Relevansi indeks kedalaman (P2) tahun 2017 di Kabupaten Aceh Tamiang sejalan dengan Nasional, sedikit berbeda dengan provinsi yang memburuk.

II.2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

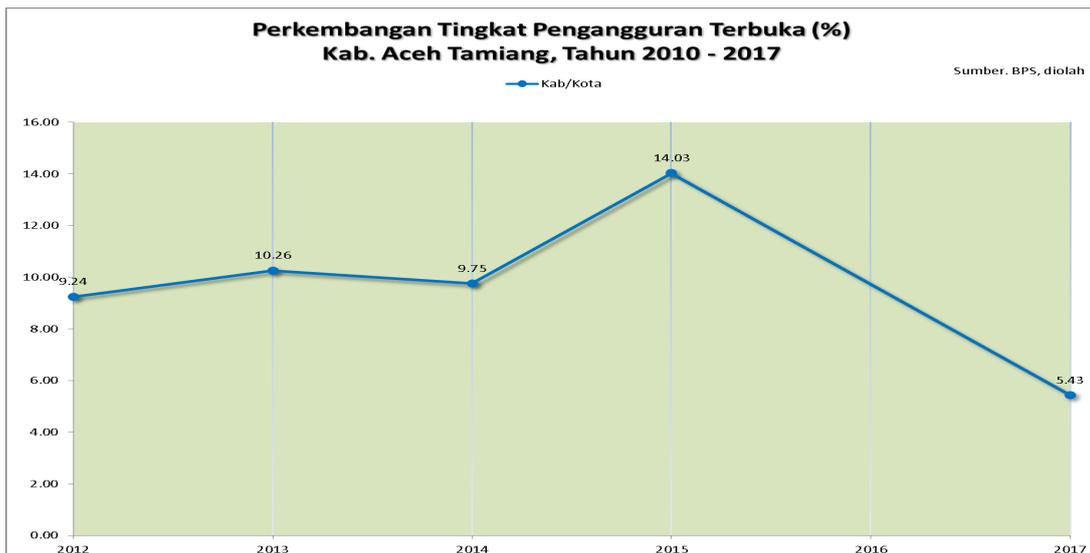
Angka TPT Kabupaten Aceh Tamiang relatif tinggi, karena angkanya diatas 5 persen. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena putus asa/merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (discourage worker), atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja/mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (future starts).

Gambar II.17 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017



Pada tahun 2017 posisi relatif tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Aceh Tamiang 5,43% di bawah rata-rata Provinsi Aceh (6,57%).

Gambar II.18 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Aceh Tamiang, Tahun 2012-2017



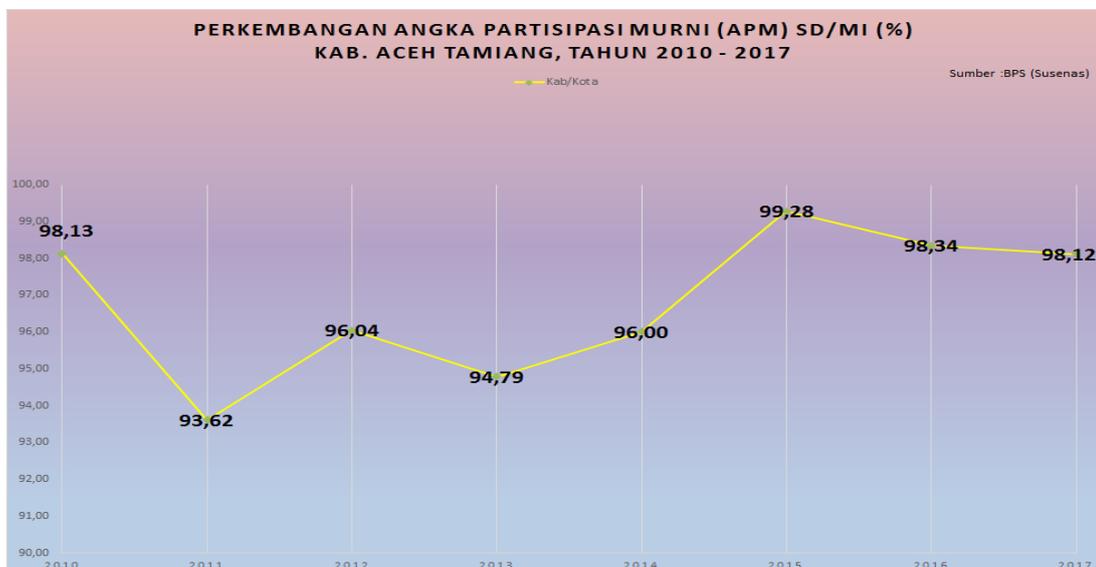
Dilihat dari perkembangannya, tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Tamiang dari tahun 2012- 2015 terus mengalami peningkatan, namun di tahun 2017 terjadi penurunan dengan angka 5,43%. Kondisi ini membaik jika dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah sekitar 16.761 jiwa atau sekitar 14,03% terhadap angkatan kerja.

II.2.2 Dimensi Pendidikan

II.2.2.1 Angka Partisipasi Murni (APM)

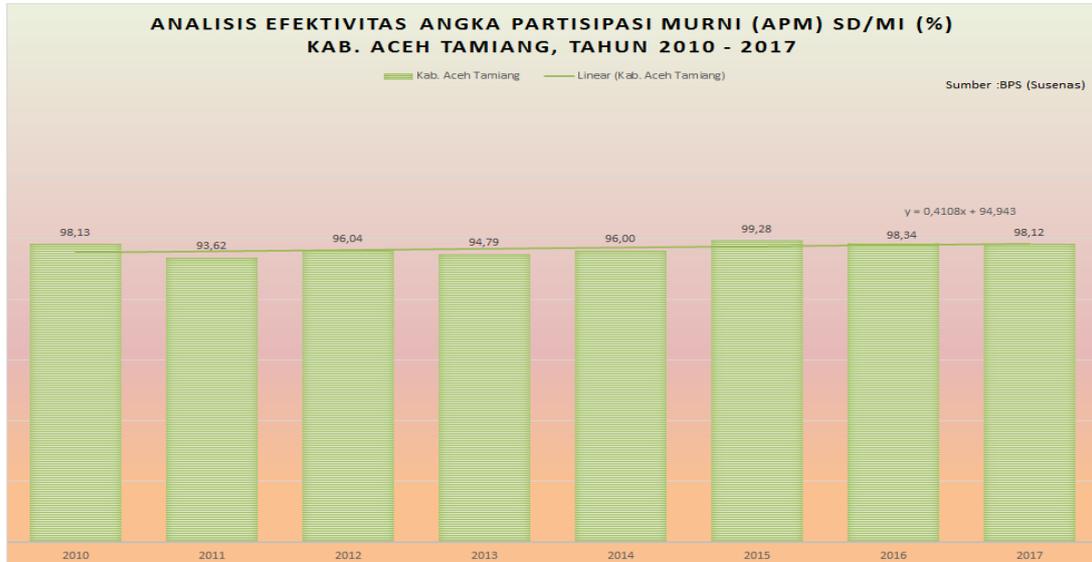
Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.

Gambar II.19 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2010-2017



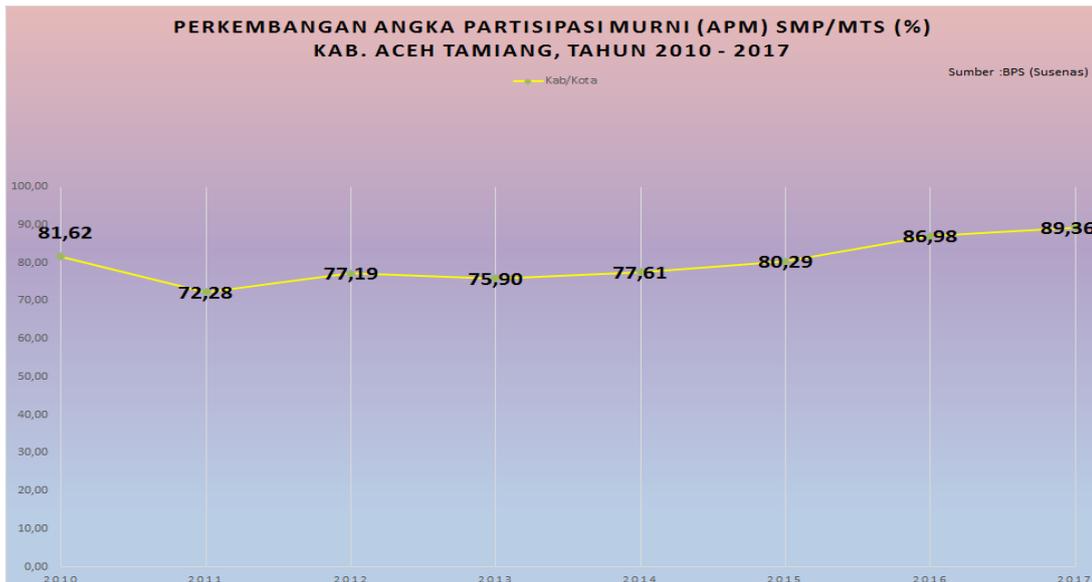
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI di Kabupaten Aceh Tamiang dari tahun 2013-2017 cenderung membaik, yaitu pada tahun 2013 sebesar 94,79% terus mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2015 menjadi 99,28%, meskipun perkembangannya menurun di tahun 2017 menjadi 98,12%.

Gambar II.20 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2010-2017



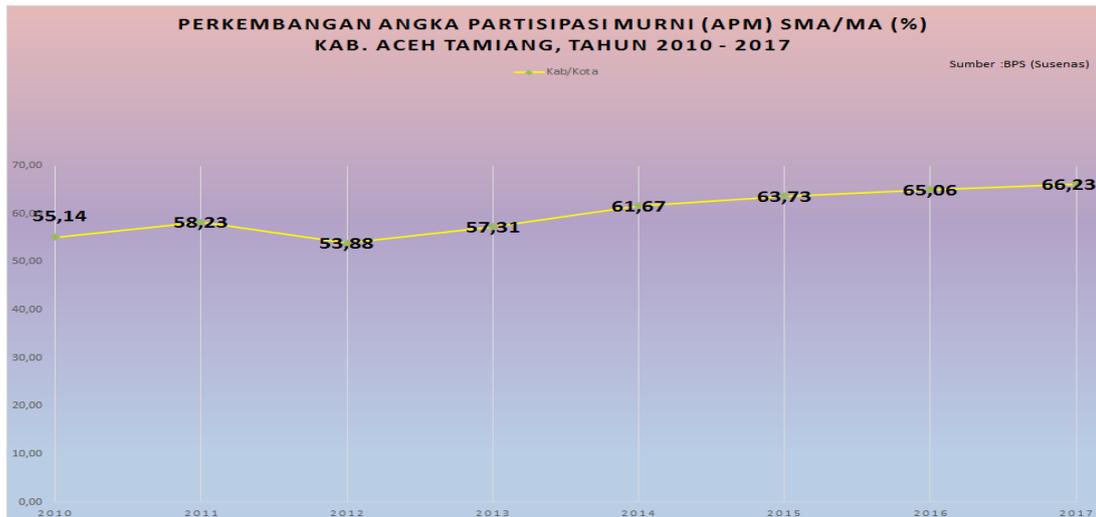
Analisis efektivitas APM SD/MI di Kabupaten Aceh Tamiang dari tahun 2010-2015 menunjukkan perbaikan meskipun kinerjanya melambat.

Gambar II.21 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2010-2017



Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kabupaten Aceh Tamiang selama 2013-2017 terus mengalami kenaikan, pada tahun 2013 sebesar 75,90% naik menjadi 89,36% di tahun 2017 dengan capaian lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar II.22 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2010-2017



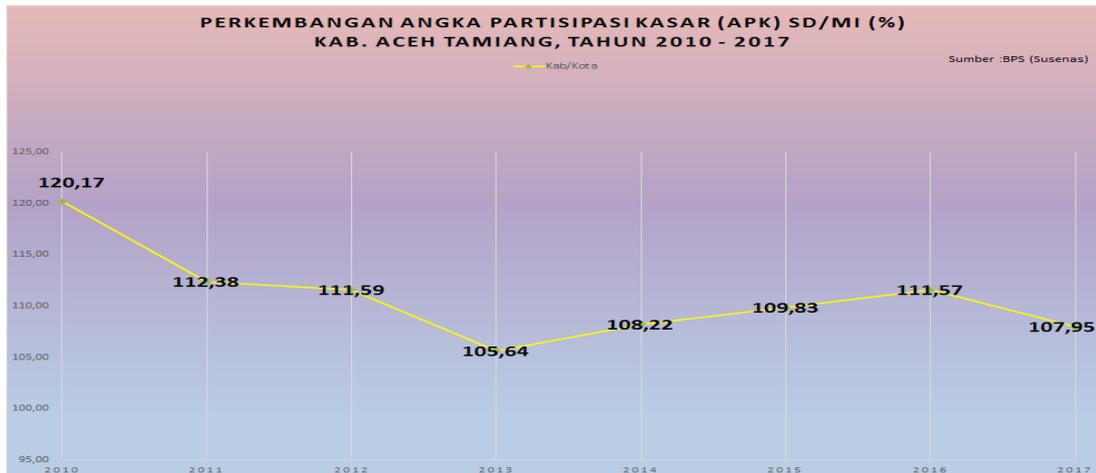
Dari gambar di atas dapat dikatakan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA di Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2012-2017 konsisten membaik, yaitu pada tahun 2012 sebesar 53,88% dan pada tahun 2017 terus mengalami kenaikan sebesar 66,23%.

II.2.2.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.

APK SD/MI adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bersekolah di SD/MI dengan jumlah murid kelompok usia 7-12 tahun.

Gambar II.23 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2010-2017



Perkembangan APK SD/MI sederajat Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2012-2014 terjadi fluktuasi, namun pada tahun 2017 APK SD/MI di Kabupaten Aceh Tamiang sebesar 107,95%.

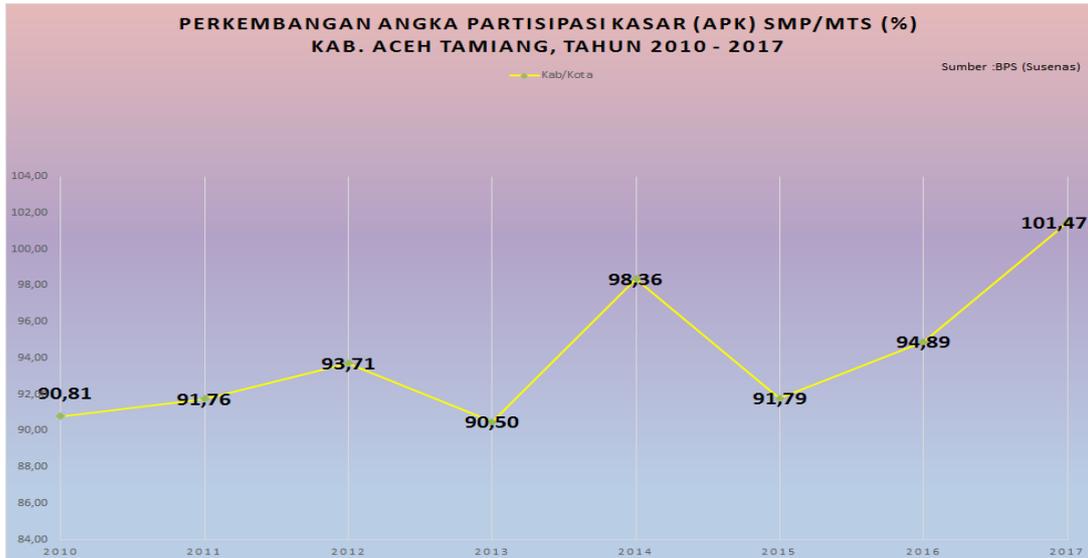
Gambar II.24 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2010-2017



Tingkat efektivitas APK SD/MI sederajat Kabupaten Aceh Tamiang dalam kurun waktu lima tahun (2013-2017) cenderung fluktuatif dengan kinerja peningkatan melambat.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bersekolah di SMP/MTs dengan jumlah murid kelompok usia 13-15 tahun.

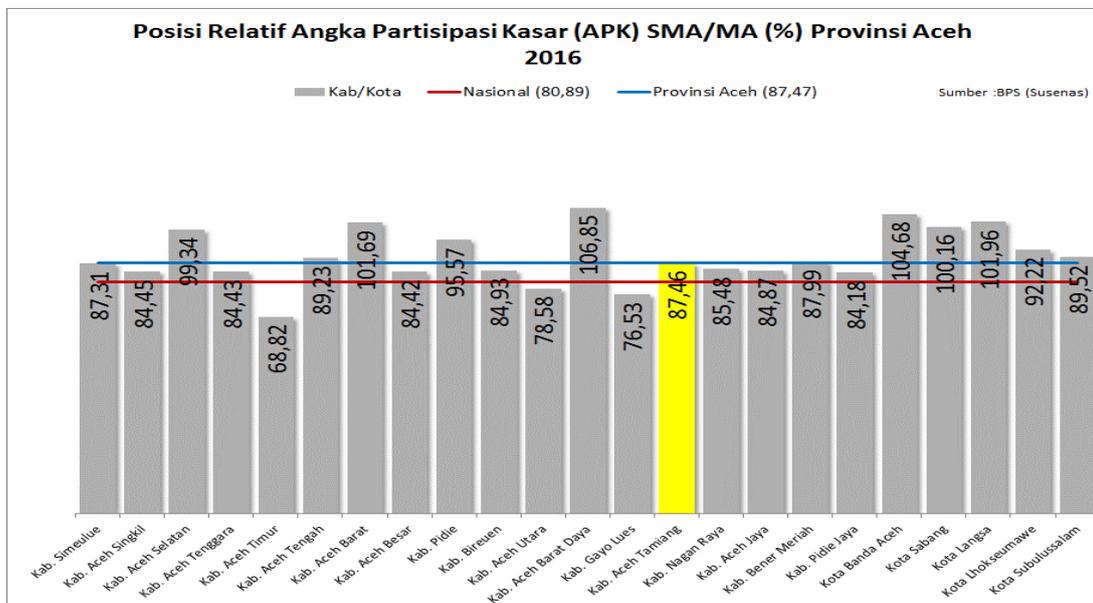
Gambar II.25 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2010-2017



Dari gambar di bawah dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs tahun 2017 di Kabupaten Aceh Tamiang sebesar 101,47%, kondisi menunjukkan bahwa APK SMP/MTs semakin membaik.

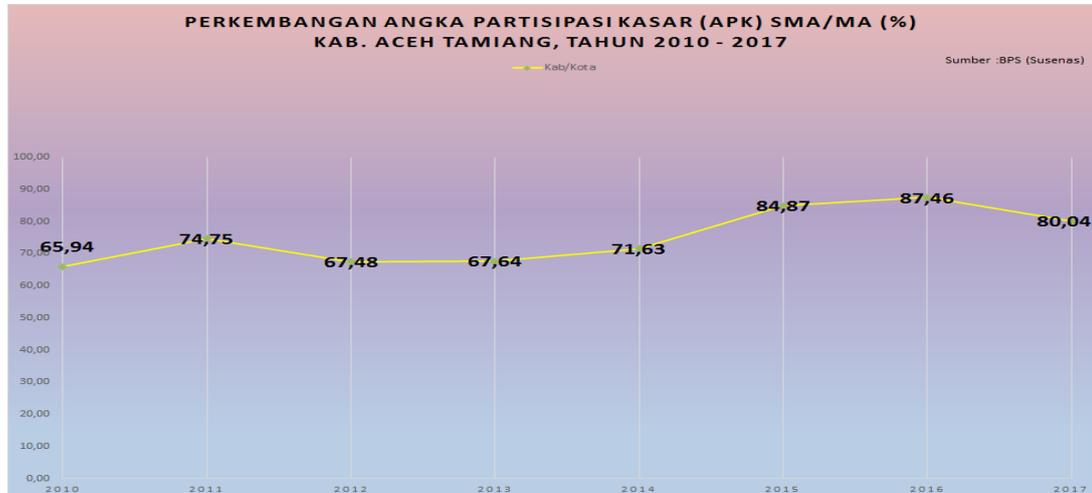
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bersekolah di SLTA dengan jumlah murid kelompok usia 16-18 tahun.

Gambar II.26 Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Provinsi Aceh Tahun 2017



Posisi relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2016 sebesar (87,46%) berada di bawah rata-rata Provinsi Aceh (87,47%) dan di bawah rata-rata Nasional (80,89%).

Gambar II.27 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2010-2017



Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa Perkembangan APK SMA/MA Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2012-2016 konsisten membaik, yaitu pada tahun 2012 sebesar 67,48% dan pada tahun 2016 terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 87,46%, namun di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 80,04%.

II.2.2.3 Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah adalah Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun.

Gambar II.28 Perkembangan Angka Putus Sekolah Usia 7-12 (%) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2012-2016



Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI di Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2012- 2016 cenderung fluktuatif dengan persentase di tahun 2012 sebesar 0,12% naik hingga 0,21 % pada tahun 2016. Angka ini menunjukkan bahwa Angka Putus Sekolah di Kabupaten Aceh Tamiang memburuk.

Gambar II.29 Perkembangan Angka Putus Sekolah Usia 13-15 (%) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2012-2016



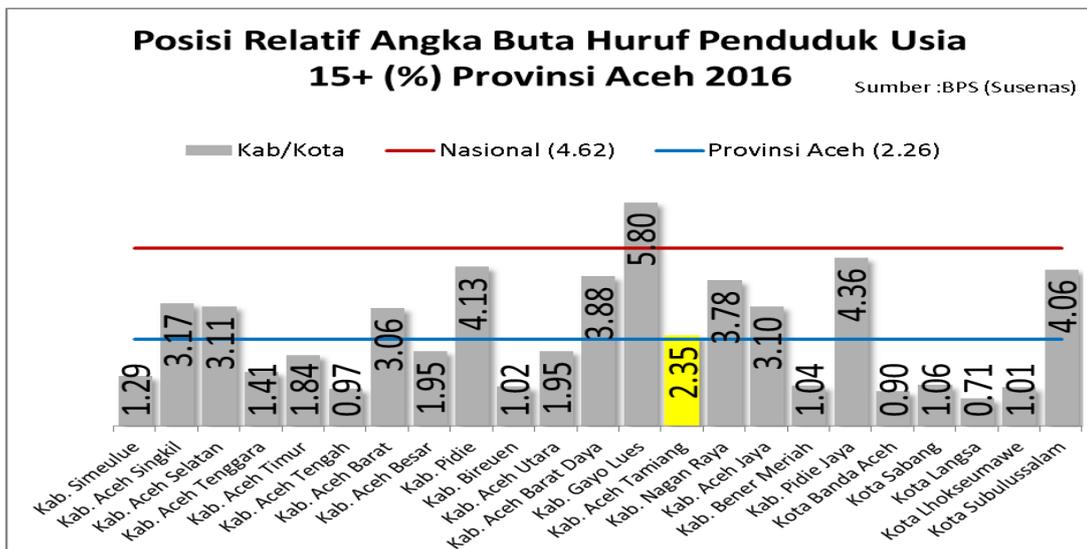
Dari gambar diatas dapat dikatakan bahwa perkembangan Angka Putus Sekolah SMP/MTs di Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif, namun di tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 0,64%. Hal ini

menunjukkan semakin banyak Angka Putus Sekolah Usia 13-15 tahun di Kabupaten Aceh Tamiang.

II.2.2.4 Angka Buta Huruf

Indikator pencapaian tingkat pendidikan yang tidak kalah penting adalah kemampuan penduduk untuk dapat membaca dan menulis. Dimana salah satu tujuan nasional adalah memberantas buta huruf yang masih terjadi di masyarakat. Ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis penduduk berumur 15 tahun ke atas. Kemampuan ini dipandang sebagai kemampuan dasar minimal yang harus dimiliki oleh setiap individu, agar paling tidak memiliki peluang untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan. Tinggi rendahnya angka buta huruf suatu masyarakat mencerminkan kualitas masyarakat tersebut.

Gambar II.30 Posisi Relatif Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+ (%) Provinsi Aceh Tahun 2016



Posisi relatif angka buta huruf Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2016 berada sedikit di atas rata-rata Provinsi Aceh dan di bawah rata-rata Nasional. Angka ini menunjukkan bahwa Angka Buta Huruf di Kabupaten Aceh Tamiang lebih baik dari capaian Nasional namun sedikit lebih buruk dari Provinsi Aceh.

Gambar II.31 Perkembangan Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+ (%) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2012-2017



Dari gambar diatas dapat dikatakan bahwa perkembangan angka buta huruf penduduk usia 15+ di Kabupaten Aceh Tamiang semakin membaik, tahun 2012 sebesar 4,03 % hingga mencapai angka 1,55% pada tahun 2017.

II.2.2.5 Rasio Siswa/Guru SD/MI

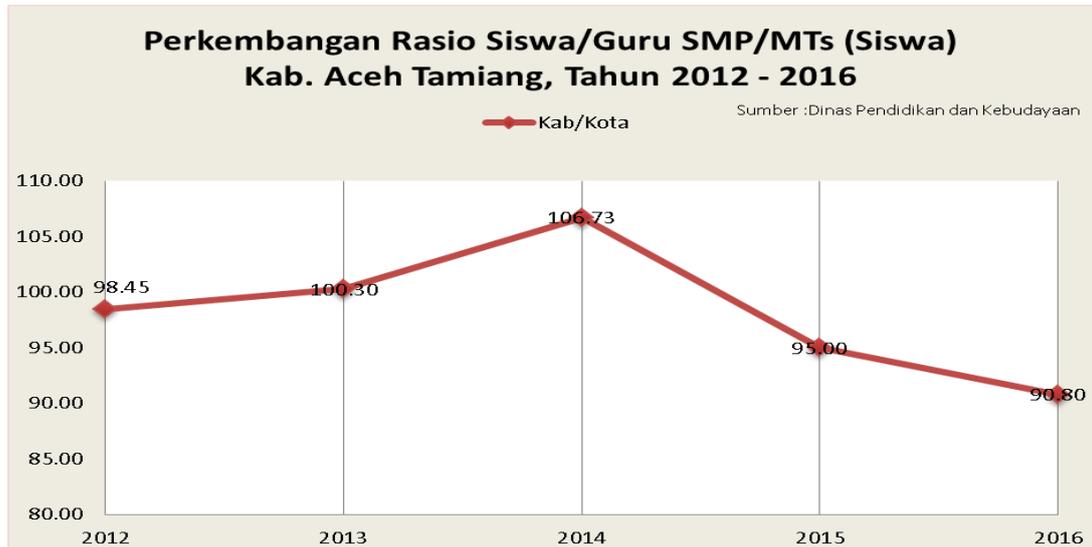
Gambar II.32 Perkembangan Rasio Siswa/Guru SD/MI Kab. Aceh Tamiang Tahun 2012-2016



Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan rasio siswa/guru SD/MI di Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2016 adalah sebesar 88,19% artinya

bahwa 1000 murid dilayani oleh 88 orang guru atau 1:11. Dengan demikian dapat dikatakan Jumlah guru yang ada pada jenjang SD/MI sudah mencukupi bahkan berlebih. Menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM) idealnya untuk guru jenjang pendidikan SD/MI 1 (satu) orang guru harus dapat melayani 32 (tiga puluh dua) orang peserta didik.

Gambar II.33 Perkembangan Rasio Siswa/ Guru SMP/MTs (Siswa) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2012-2016



Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan rasio siswa/guru SMP/MTs di Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2016 adalah sebesar 90,80% artinya bahwa 1000 murid dilayani oleh 91 orang guru atau 11:1. Dengan demikian dapat dikatakan Jumlah guru yang ada pada jenjang SMP/MTs sudah mencukupi bahkan berlebih . Menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM) idealnya untuk guru jenjang pendidikan SMP/MTs 1 (satu) orang guru harus dapat melayani 32 (tiga puluh dua) orang peserta didik.

Tabel II.5 Indikator-indikator prioritas di bidang pendidikan yang menjadi determinan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017

INDIKATOR	CAPAIAN DAERAH	CAPAIAN PROVINSI	CAPAIAN NASIONAL
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	107,95	110,31	108,5
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	101,47	98,74	90,23
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%)	80,04	87,52	82,84

INDIKATOR	CAPAIAN DAERAH	CAPAIAN PROVINSI	CAPAIAN NASIONAL
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)	98,12	98,54	97,19
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)	89,36	86,31	78,4
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%)	66,23	70,15	60,37
Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun (2016)	0,21	0,38	0,76
Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun (2016)	0,64	2,02	4,6
Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 16 - 18 Tahun (2013)	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data
Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+	1,55	2,26	4,62

II.2.3 Dimensi Kesehatan

Selain dilihat berdasarkan bidang pendidikan, kemiskinan juga dapat ditinjau dari bidang kesehatan. Bidang kesehatan berkaitan dengan kondisi kesehatan masyarakat dan akses pada pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam menilai derajat kesehatan masyarakat terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan. Indikator-indikator tersebut pada umumnya tercermin dalam kondisi Mortalitas (Angka Kematian), Morbiditas (Angka Kesakitan) dan Status Gizi. Derajat kesehatan dipengaruhi 4 faktor utama yaitu: lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan genetika.

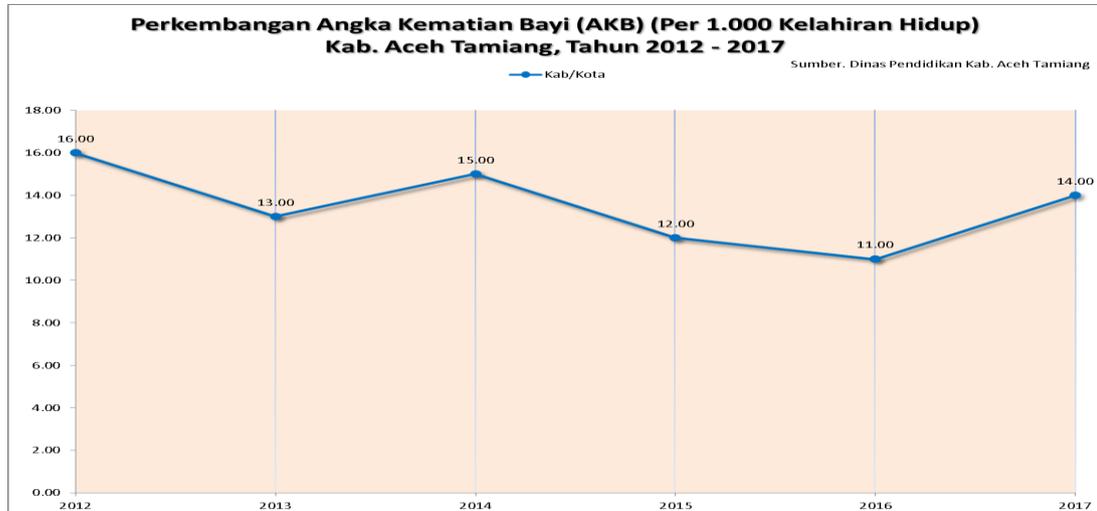
Mortalitas adalah angka kematian yang terjadi pada kurun waktu dan tempat yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, dapat berupa penyakit maupun sebab lainnya. Keberhasilan pelayanan kesehatan dan berbagai program pembangunan kesehatan lainnya juga dapat diukur melalui tingkat kematian yang ada. Angka kematian meliputi Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA) dan Angka Kematian Ibu (AKI).

II.2.3.1 Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang

sama. AKB merupakan indikator yang biasanya digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat.

Gambar II.34 Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012-2017



Jika di lihat dari Target Nasional Angka Kematian Bayi yaitu 24/1000 KH, maka angka kematian bayi di Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2016 sudah mencapai target yang ditetapkan, bahkan telah memenuhi pencapaian target SDG's di 2030 yaitu sebesar 12/1000 KH. Pada gambar juga dapat dilihat perkembangan angka kematian bayi pada tahun 2014-2016 mengalami penurunan dari 15/1000 KH menjadi 11/1000KH, namun pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 14/1000 KH.

Gambar II.35 Analisis Efektivitas Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012-2017

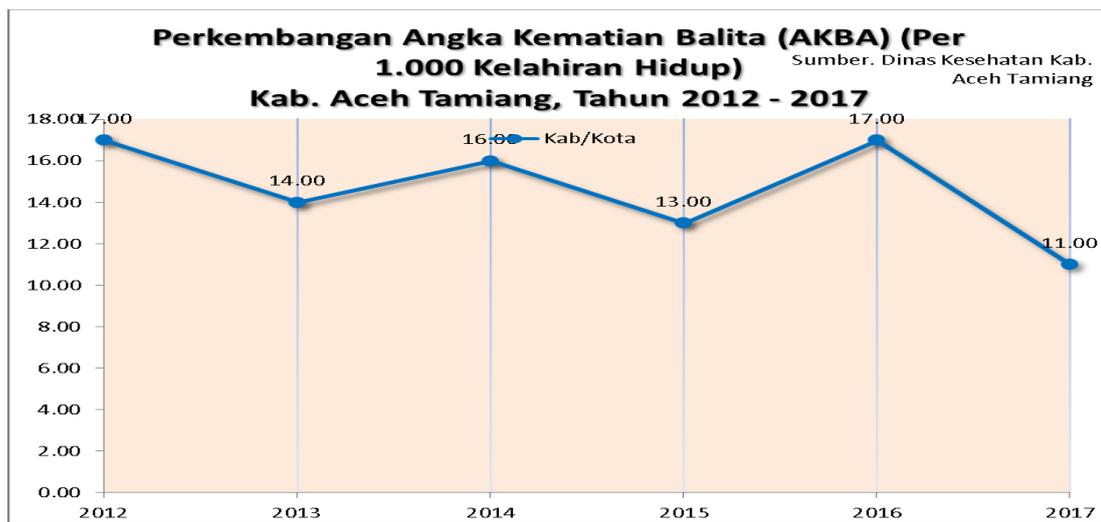


Tingkat efektivitas AKB di Kabupaten Aceh Tamiang dalam kurun waktu lima tahun (2012-2016) menunjukkan perbaikan dengan kinerja penurunan mengalami percepatan namun di tahun 2017 terjadi kenaikan.

II.2.3.2 Angka Kematian Balita (AKABA)

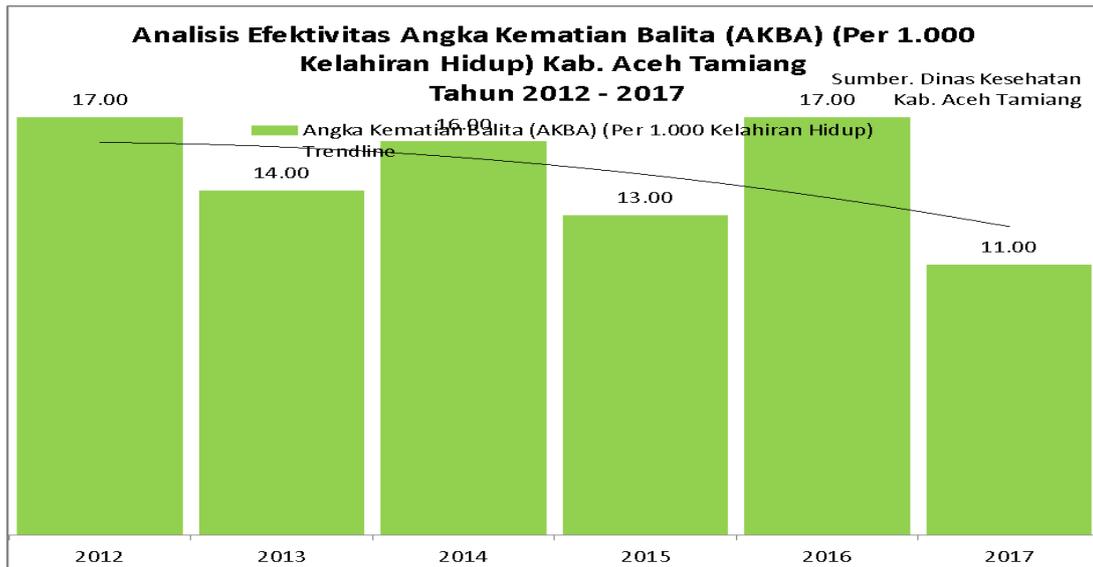
Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup.

Gambar II.36 Perkembangan Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kab. Aceh Tamiang, Tahun 2012-2017



Perkembangan AKBA di Kabupaten Aceh Tamiang dari tahun 2012 s/d 2017 cenderung fluktuatif. Jika di lihat dari target SDG's, Angka Kematian Balita di tahun 2030 adalah sebesar 25/1000 KH, maka angka kematian balita di Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2017 sudah mencapai target yang di harapkan dengan angka 11/1000 KH.

Gambar II.37 Analisis efektivitas Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1000 KH) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2012-2017

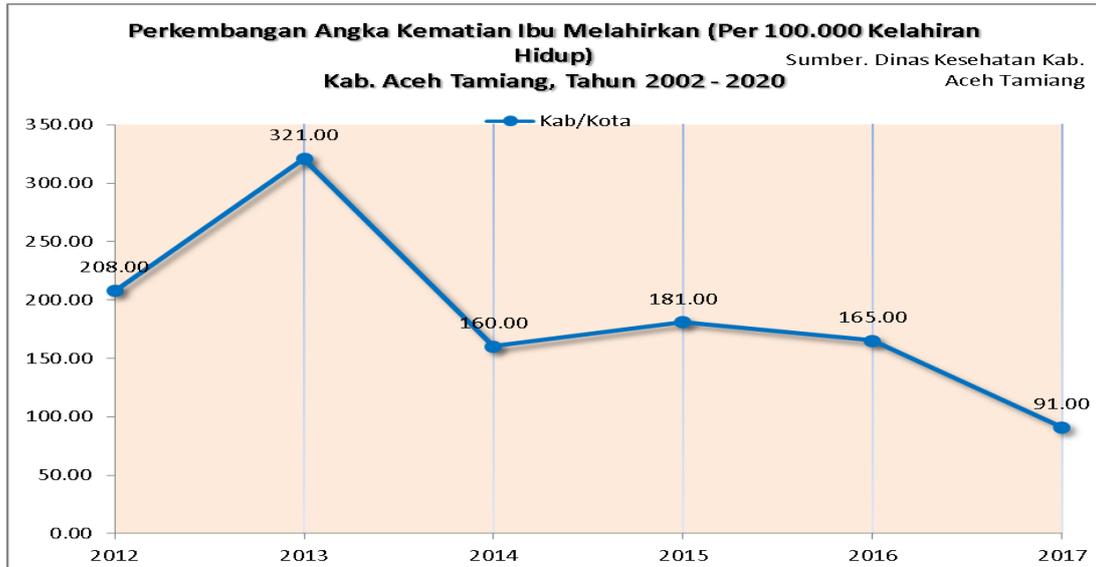


Tingkat efektivitas AKBA Kabupaten Aceh Tamiang dalam kurun waktu lima tahun (2012-2017) menunjukkan perbaikan dengan kinerja penurunan mengalami percepatan.

II.2.3.3 Angka Kematian Ibu (AKI)

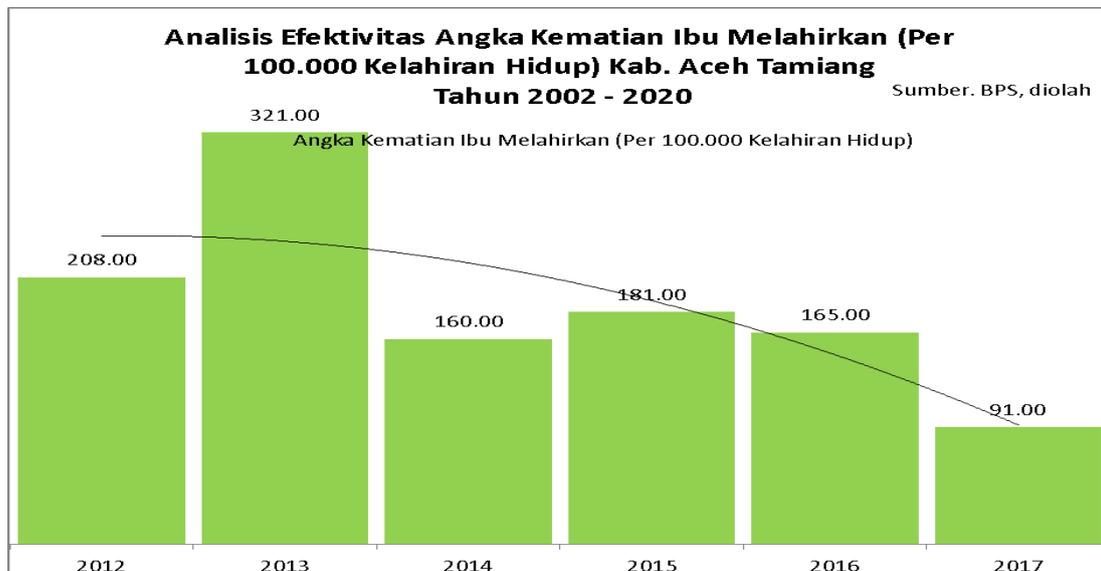
Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. AKI juga dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Sensitifitas AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadikannya indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. AKI mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan masa kehamilan, persalinan dan nifas. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Aceh Tamiang dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar II.38 Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2012-2017



Perkembangan angka kematian ibu dari tahun 2013 s/d 2017 terus mengalami penurunan. Jumlah kematian ibu tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu 18 kasus dari jumlah kelahiran hidup 5.599 jiwa (321/100.000 KH). Jika dibandingkan dengan Target Nasional bahwa Angka Kematian Ibu sebesar 306/100.000 KH pada tahun 2019, maka Angka Kematian Ibu di Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2017 telah mencapai Target Nasional.

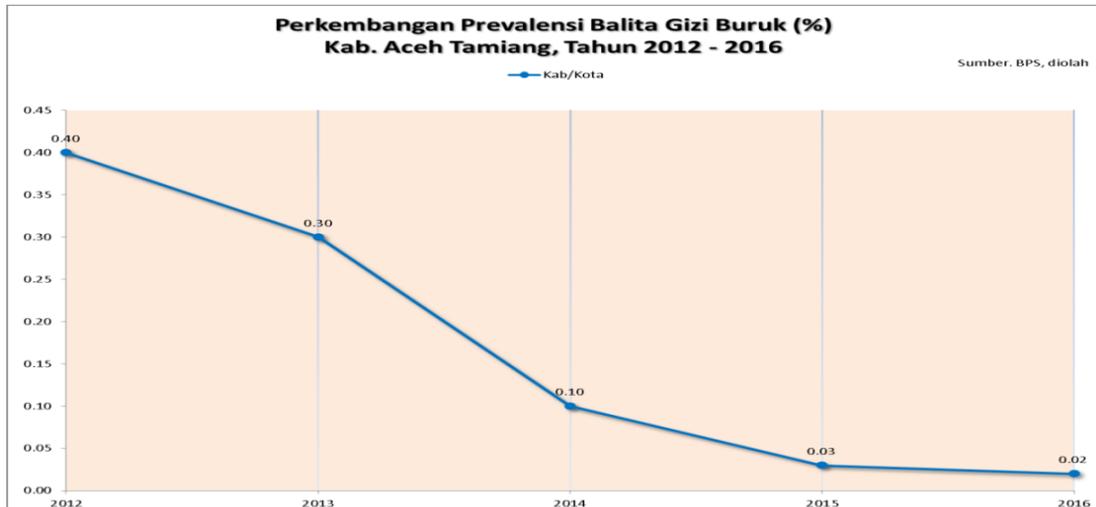
Gambar II.39 Analisis Efektivitas Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 KH) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2012-2017



Tingkat efektivitas AKI Kabupaten Aceh Tamiang dalam kurun waktu lima tahun (2012-2017) menunjukkan perbaikan dengan kinerja penurunan mengalami percepatan.

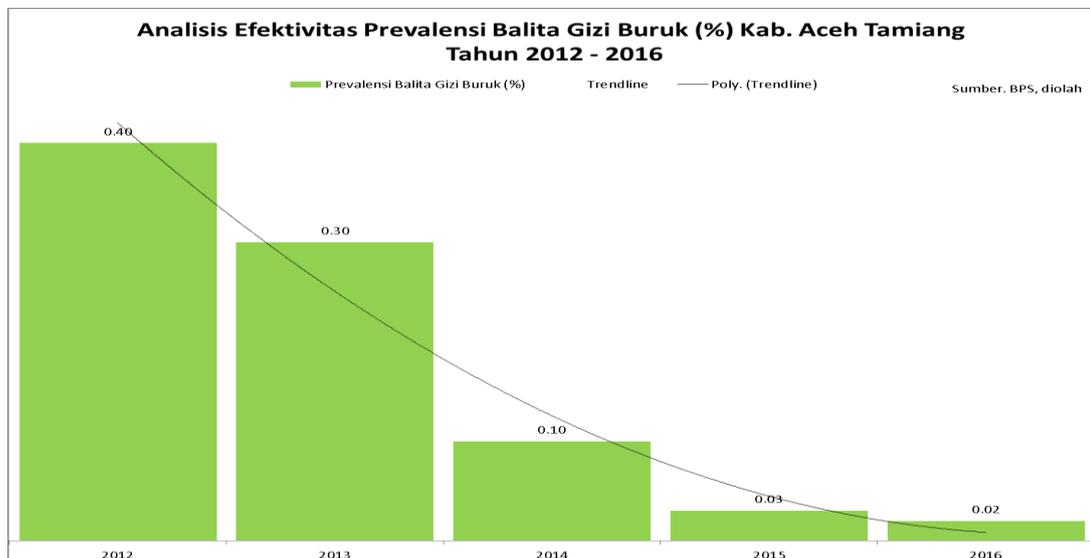
II.2.3.4 Prevalensi Balita Gizi Buruk

Gambar II.40 Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2012-2016



Perkembangan Kasus gizi buruk di Kabupaten Aceh Tamiang mulai tahun 2012 setiap tahunnya mengalami penurunan hingga tahun 2016 (6 kasus atau 0,02%). Kasus balita gizi buruk tertinggi terjadi pada tahun 2012 dimana terdapat 116 kasus balita gizi buruk dari 30.277 balita yang ada (0,4%).

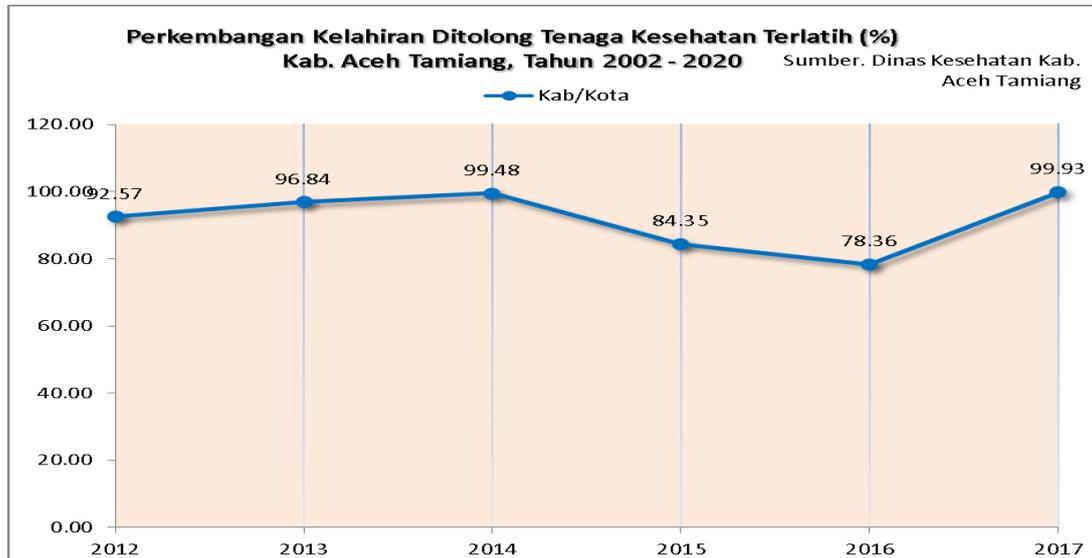
Gambar II.41 Analisis Efektivitas Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2012-2016



Tingkat efektivitas Balita Gizi Buruk Kabupaten Aceh Tamiang dalam kurun waktu lima tahun (2012-2016) menunjukkan perbaikan dengan kinerja penurunan mengalami percepatan.

II.2.3.5 Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan

Gambar II.42 Perkembangan Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih Kab. Aceh Tamiang Tahun 2012-2017



Perkembangan Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2012-2017 cenderung menurun, namun pada tahun 2017 terjadi kenaikan menjadi 99,93%.

II.2.4 Dimensi Prasarana Dasar

II.2.4.1 Penduduk Yang Memiliki Akses Air Minum yang Layak

Kualitas air minum yang digunakan terkait kuat dengan tingkat kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu pada saat mencari tempat tinggal biasanya yang menjadi perhatian utama adalah sumber air. Kebersihan dan kesehatan air minum suatu rumah tangga berpengaruh langsung kepada anggota rumah tangga yang mengkonsumsi air tersebut karena air minum merupakan kebutuhan utama manusia dalam menjamin kelangsungan hidupnya. Air minum yang bersih dan sehat adalah air minum yang terbebas dari kuman-kuman penyebab timbulnya penyakit. Bila sumbernya tercemar oleh kotoran, maka dikhawatirkan air yang

dihasilkannya pun ikut tercemar pula. Air leding dan air kemasan merupakan air yang kebersihan dan kesehatannya lebih terjamin.

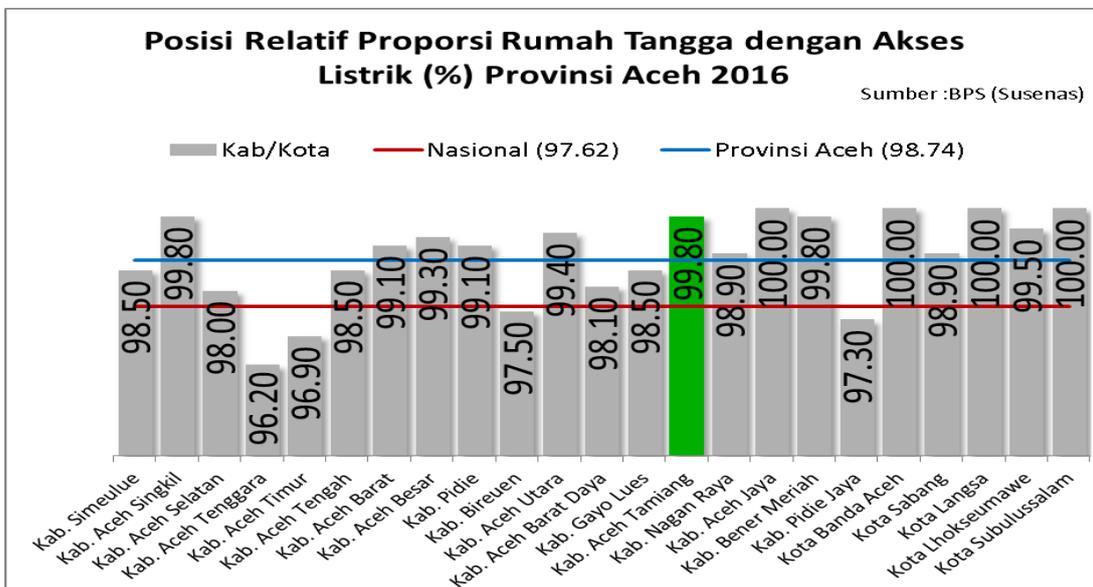
Gambar II.43 Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2012-2017



Perkembangan akses rumah tangga terhadap air minum layak Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2012-2016 konsisten membaik, yaitu pada tahun 2012 sebesar 25,54% naik menjadi 64,49% pada tahun 2016, namun di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 53,68%.

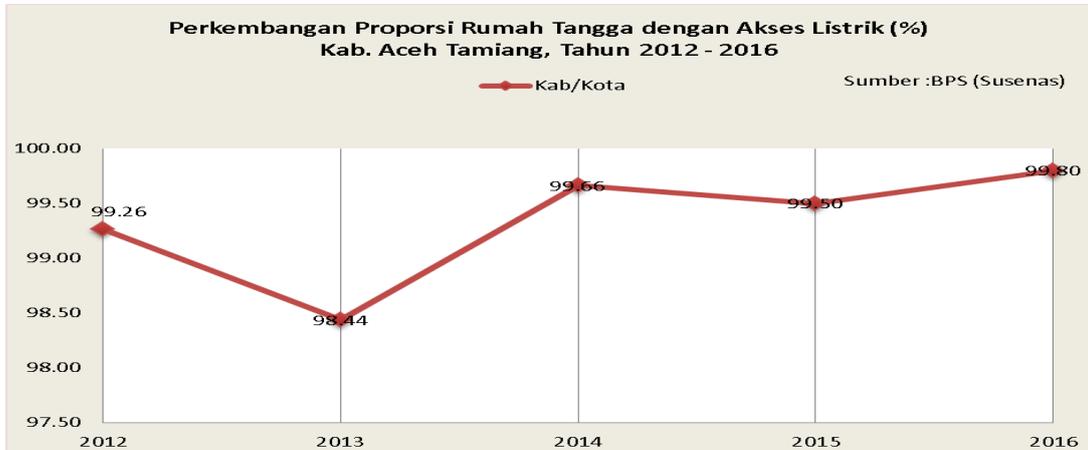
II.2.4.2 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Gambar II.44 Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Provinsi Aceh 2016



Dari gambar di atas dapat dikatakan bahwa Posisi Relatif Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 berada di atas Provinsi Aceh (98,74%) dan Nasional (97,62%). Hal ini menunjukkan bahwa akses listrik di Kabupaten Aceh Tamiang sudah merata.

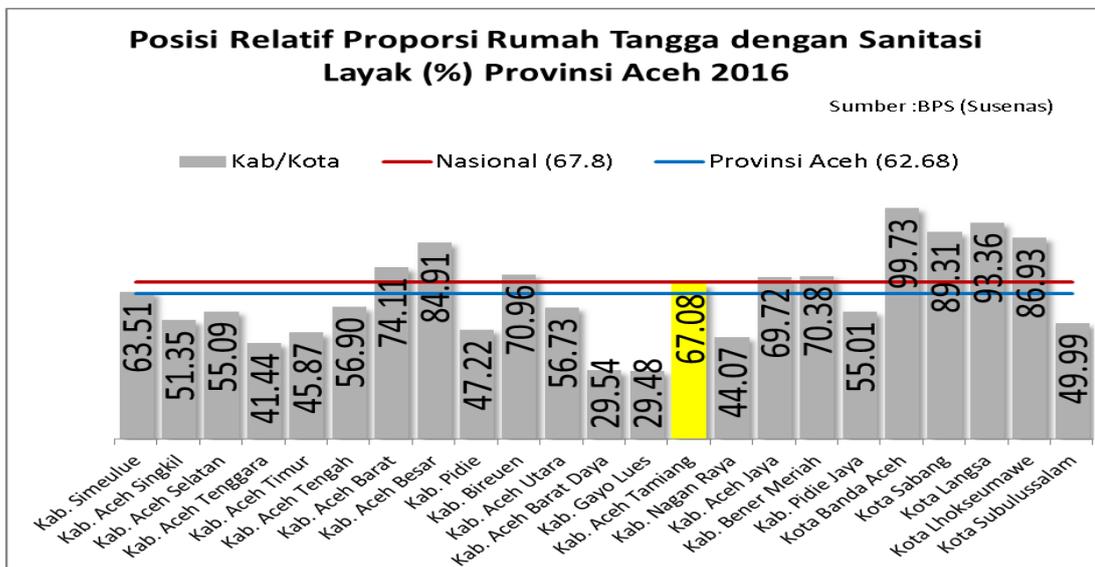
Gambar II.45 Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2012-2016



Perkembangan proporsi rumah tangga dengan akses listrik Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif, yaitu pada tahun 2012 sebesar 99,26% turun menjadi 98,44% pada tahun 2013 dan naik kembali di tahun 2016 menjadi 99,80%.

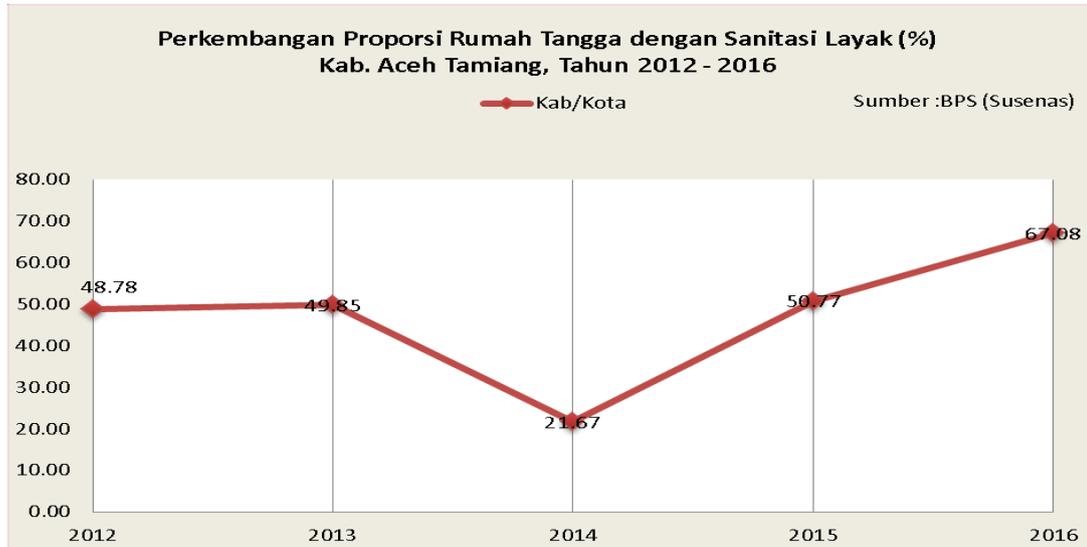
II.2.4.3 Penduduk yang Memiliki Akses Sanitasi Layak

Gambar II.46 Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Provinsi Aceh Tahun 2016



Posisi relatif proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak Kabupaten Aceh Tamiang lebih baik dari Provinsi (62,68%) dan sedikit lebih buruk dari Nasional (67,8%).

Gambar II.47 Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kab. Aceh Tamiang Tahun 2012-2016



Perkembangan proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2012-2015 cenderung fluktuatif, namun di tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 67,08%. Dari data dapat dikatakan bahwa rumah tangga dengan sanitasi layak di Kabupaten Aceh Tamiang semakin membaik.

BAB III

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

III.1 Regulasi Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Tamiang dalam rangka penanggulangan kemiskinan terkait dimensi ekonomi dan ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, prasarana dasar, dan ketahanan pangan, sebagaimana Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013 – 2017, diarahkan kepada :

A. Dimensi Ekonomi dan Ketenagakerjaan :

1. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang masalah sosial;
2. Meningkatkan pelayanan sosial dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
3. Meningkatkan jumlah wirausaha produktif baik kelompok maupun mandiri;
4. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka penyaluran bantuan kepada masyarakat kurang mampu dan penyandang cacat;
5. Meningkatkan Program Pengembangan wilayah Strategis dan cepat tumbuh (PNPM);
6. Menumbuh kembangkan produk lokal yang handal (One Village One Product);
7. Mengembangkan kawasan sentra industri;
8. Meningkatkan nilai tambah produk lokal unggulan;
9. Membina dan memberdayakan IKM, koperasi dan UKM serta peningkatan SDM;
10. Menetapkan kawasan wisata sesuai struktur dan pola ruang;
11. Meningkatkan pengembangan tempat usaha perdagangan;
12. Meningkatkan kesempatan kerja dan lapangan usaha melalui sistem padat karya;

13. Mengintensifkan, pembinaan kewirausahaan dan pengembangan usaha perdagangan yang kondusif;
14. Menumbuhkembangkan potensi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di masyarakat;
15. Meningkatkan perlindungan pengusaha dan pekerja di perusahaan;
16. Meningkatkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
17. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja pemuda dan perempuan.

B. Pendidikan :

1. Memfasilitasi PKBM;
2. Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya lembaga pendidikan perguruan tinggi vokasi;
3. Meningkatkan profesionalisme aparatur, mutu tenaga pendidik dan kependidikan;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam penyelenggaraan pendidikan;
5. Menjamin ketersediaan bantuan beasiswa kepada fakir/miskin;
6. Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan;
7. Menumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan dan arsip;
8. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan kampung dalam pelaksanaan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan keluarga.

C. Kesehatan :

1. Meningkatkan penerapan Manajemen Inovasi Pelayanan;
2. Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat;
3. Meningkatkan upaya keselamatan ibu melahirkan dan anak;
4. Meningkatkan kesehatan anak balita;
5. Memperbaiki gizi masyarakat;
6. Meningkatkan upaya kesehatan lingkungan.

D. Prasarana Dasar :

1. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan akses pendidikan;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan;

3. Meningkatkan pembangunan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
4. Meningkatkan pemberdayaan komunitas perumahan;
5. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana permukiman;
6. Meningkatkan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan;
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perkotaan dan desa;
8. Meningkatkan penyediaan air baku, dan pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.

E. Ketahanan Pangan :

1. Meningkatkan optimalisasi dan reklamasi lahan sebagai kawasan pangan lestari;
2. Meningkatkan kemampuan SDM dalam rangka penanganan rawan pangan;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana lumbung pangan masyarakat dan pemerintah;
4. Menumbuhkembangkan produk lokal yang handal;
5. Menumbuhkembangkan agribisnis pertanian, peternakan dan Perikanan;
6. Menyusun Regulasi dibidang pertanian, peternakan dan Perikanan;
7. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi terapan tentang pertanian, peternakan dan perikanan;
8. Pemanfaatan Sungai Tamiang sebagai kawasan industri ketahanan pangan;
9. Meningkatkan produksi hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
10. Pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan air irigasi melalui perbaikan jaringan irigasi tingkat usaha tani;
11. Mengembangkan tanaman utama lokal lainnya;
12. Meningkatkan pengetahuan dan memotivasi penggunaan bahan pangan lokal;
13. Meningkatkan jalan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;

14. Meningkatkan pemasaran produksi hasil pertanian, peternakan dan Perikanan;
15. Meningkatkan teknologi, sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, peternakan serta perikanan.

Sedangkan kebijakan pembangunan daerah di tahun 2017 menurut Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017, terkait dimensi ekonomi dan ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, prasarana dasar, dan ketahanan pangan, diantaranya adalah :

A. Ekonomi dan Ketenagakerjaan :

1. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Menjamin akses penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) untuk mendapatkan pelayanan dasar bidang sosial.
3. Mendukung pertumbuhan dan penguatan ekonomi masyarakat dan desa.

B. Pendidikan :

Meningkatkan sarana dan infrastruktur pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan.

C. Kesehatan :

Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan dasar.

D. Prasarana Dasar :

1. Penataan perkotaan
2. Pembangunan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman, didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

E. Ketahanan Pangan :

Melakukan pengembangan potensi ekonomi daerah melalui produk unggulan daerah.

III.2 Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

III.2.1 Sinkronisasi antar dokumen perencanaan

Pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan Tahun Anggaran 2017 yang didanai APBK Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2017, disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.1 Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (APBK/OTSUS T.A 2015)

NO	Kebijakan RPJM Tahun Ketiga (2015)	SKPK Pelaksana	Program	Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)	Kesesuaian Program / Kegiatan dgn Reaksi Daerah
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat	Dinsosnakertrans	1) Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	1. Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	19,990,000	×
				2. Pelatihan Keterampilan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Keluarga Rentan	49,377,000	√
				3. Pelatihan Keterampilan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	50,157,000	√
				4. Dana Sharing Kegiatan-kegiatan program Keluarga Harapan (PKH)	158,470,000	×
			2) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	5. Buffer Stock Logistik dan Mobilisasi Bantuan untuk Korban Bencana Sosial	47,500,000	×
				6. Rehab Rumah Tidak Layak	56,537,000	√
				7. Pengadaan Bahan Bangunan Rumah Bagi Masyarakat Tidak Mampu	43,900,000	×
				8. Rehab Rumah di Kecamatan Seruway	143,133,000	×
				9. Rehabilitasi Rumah Warga Miskin	79,505,000	×
				10. Sosialisasi Bahaya HIV-AIDS bagi Eks Wanita Penyandang Masalah Tuna Sosial (WNPTS)	100,108,000	×
				11. Pelatihan Keterampilan Kecantikan dan Tata Rias Pengantin Bagi Penyandang Cacat Tuna Rungu/Tuna Wicara	66,082,000	×
				12. Pengadaan Sarana dan Prasarana Bagi Penyandang Cacat Fisik	126,663,750	√
				13. Pelatihan dan Keterampilan Usaha Ekonomi Produksi (UEP) Bagi Penyandang Disabilitas	152,940,000	×

Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (APBK/OTSUS T.A 2015)

NO	Kebijakan RPJM Tahun Ketiga (2015)	SKPK Pelaksana	Program	Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)	Kesesuaian Program / Kegiatan dgn Reaksi Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				14. Pembinaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Penyandang Disabilitas	206,852,000	×
		BPM	3) Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Teknologi Tepat Guna	15. Penyelenggaraan Gelar Teknologi Tepat Guna	117,986,390	×
				16. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Pedesaan (Posyantekde)	58,324,550	×
				17. Lomba Inovasi Tknologi Tepat Guna Tk. Kabupaten/Propinsi	30,908,350	×
2	Meningkatkan usaha perlindungan terhadap tenaga kerja	Dinsosnakertrans	4) Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	18. Penyebaran Informasi Tentang Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Bagi Pengusahaan Tenaga Kerja	32,820,000	×
				19. Fasilitasi Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit Kabupaten Aceh Tamiang	38,820,000	×
				20. Fasilitasi Penyelesaian Hubungan Industrial dan PHK Bagi Pekerja dan Pengusaha	15,446,000	×
				21. Penyuluhan Bagi Tenaga Kerja Wanita di Perusahaan	0	×
				22. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan	0	×
3	Meningkatkan kesempatan tenaga kerja dan kesempatan kerja	Dinsosnakertrans	5) Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	23. Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Masyarakat Wirausaha	45,000,000	√
4	Mengembangkan kawasan berpotensi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Dinsosnakertrans	6) Pengembangan Wilayah Transmigrasi	24. Penyuluhan dan Sosialisasi Transmigrasi	59,040,000	×
				25. DED Revitalisasi Kawasan Wilayah Transmigrasi	0	×
5	Meningkatkan kelembagaan ekonomi masyarakat	BPM	7) Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	26. Bimbingan teknis pengelolaan program PEPG, UEPG dan UEDSP	13,795,700	×
				27. Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Kampung (BUMK)	28,055,840	×

Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (APBK/OTSUS T.A 2015)

NO	Kebijakan RPJM Tahun Ketiga (2015)	SKPK Pelaksana	Program	Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)	Kesesuaian Program / Kegiatan dgn Reaksi Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				28. Pembinaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK)	44,620,000	×
				29. Fasilitasi Kebutuhan Masyarakat Pedesaan	54,988,000	×
		Disperindagkop	8) Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif	30. Fasilitasi Usaha Kecil Menengah	399,556,000	√
			9) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil menengah	31. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	0	×
			10) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	32. Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	0	×
				33. Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal	69,986,400	√
			11) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	34. Pembinaan, Pengawasan dan penghargaan Koperasi Berprestasi (dalam rangka HARKOP)	20,000,000	×
				35. Fasilitasi Bagi Pelayanan Koperasi (DED)	14,874,450	×
				36. Revitalisasi Koperasi	62,460,000	×
				37. Fasilitas Bagi Pelayanan Koperasi, Bantuan Perlengkapan Bagi Gedung Tempat Pelayanan Koperasi (TPK)(Otsus)	196,823,950	×
				38. Pembangunan Gedung Tempat Pelayanan Koperasi (TPK)(Otsus)	370,593,300	×
			12) Program Pengembangan Pembinaan Koperasi dan UKM	39. Pembuatan Data Base Koperasi	19,284,000	×
				40. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	12,760,000	×
				41. Perkuatan Modal Koperasi Makmur Bersama	47,190,000.00	×
			13) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	42. Pelatihan Management dan Pengembangan Produk dan Usaha Bagi Pengurus Koperasi	38,895,000	×

Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (APBK/OTSUS T.A 2015)

NO	Kebijakan RPJM Tahun Ketiga (2015)	SKPK Pelaksana	Program	Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)	Kesesuaian Program / Kegiatan dgn Reaksi Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				43. Pelatihan Akuntansi dan Pengembangan Produk dan Usaha Bagi Pengurus Koperasi	33,449,250	×
			14) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	44. Penataan Tempat Baru Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	32,417,820	√
			15) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	45. Pemberdayaan Industri Rumah Tangga dan Kerajinan Industri Kreatif	437,141,850	×
				46. Pemberdayaan Industri Rumah Tangga Bidang IKHH	95,840,900	×
				47. Promosi Hasil Kerajinan Daerah	54,150,000	×
				48. Kegiatan Dekranas	54,150,000	×
				49. Pembinaan Kemampuan teknologi industry, Pemanfaatan Gedung Workshop Industri	35,729,790	×
			16) Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	50. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan (Bagi Pelaku UMKM)	35,910,000	×
6	Meningkatkan produksi komoditi unggulan lokal	Dishutbun	17) Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	51. Pengadaan Fungisida Tricoderma Sp utk Karet	212,746,950	×
				52. Pengadaan Herbisida (Karet & Kelapa Sawit)	117,978,000	×
				53. Pengadaan Bibit Karet Okulasi Siap Salur (OTSUS)	298,600,000	×
				54. Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Siap Salur (OTSUS)	324,984,000	×
				55. Pembangunan Jalan Produksi Kebun	455,753,000	×
				56. Pengadaan Pupuk (Karet dan Kelapa sawit)(OTSUS)	268,277,000	×
				57. Pengadaan Timbangan Gantung Kapasitas 110kg	68,310,000	×
				58. Pengadaan Bibit Serai Wangi	127,898,000	×
				59. Pengadaan Bibit Sawit dan Karet	59,415,000	×
				60. Pembuatan Jalan Produksi Kp.Seumadam	167,942,000	×
				61. Pengadaan Kereta Sorong	74,415,000	×

Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (APBK/OTSUS T.A 2015)

NO	Kebijakan RPJM Tahun Ketiga (2015)	SKPK Pelaksana	Program	Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)	Kesesuaian Program / Kegiatan dgn Reaksi Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				62. Pengadaan Hand Sprayer	56,478,400	×
				63. Pengerasan Jalan Produksi Perkebunan	98,970,000	×
				64. Pembangunan Jalan Produksi Kp.Bukit Keranji	74,675,000	×
		DKP	18) Pengembangan perikanan tangkap	65. Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Perahu Motor Tempel (OTSUS)	361,445,000	√
				66. Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap	610,758,000	√
				67. Pengadaan Sampan	49,820,800	×
				68. Pengadaan Alat Tangkap Ikan dan Perlengkapannya	87,496,000	√
			19) Program Pengembangan Budidaya Perikanan	69. Pembangunan Jembatan Produksi Perikanan (termasuk pengawasan) (OTSUS)	1,214,071,000	√
				70. Rehab Tambak Masyarakat	99,836,626	×
				71. Pengadaan Sarana Produksi Ikan Air Payau	163,750,000	×
				72. Peningkatan Sarana Prasarana dan Agroinput air Payau	249,225,200	√
				73. Pelatihan Pembuatan Briket Pengembangan Budidaya Air Tawar/Pokdakan	175,630,000	×
				74. Rehab. Pematang & Pintu Air Tambak (DAK)	747,311,600	×
				75. Pengembangan BBI dan BBAP (Silpa DAK)	1,104,145,000	×
				76. Rehabilitasi Tambak Masyarakat (Silpa DAK)	424,795,000	×
				77. Pembuatan Keramba	29,563,000	×
				78. Rehabilitasi Tambak Masyarakat	99,836,626	×
				79. Konservasi Tuntung	50,440,000	×
				80. Pembangunan Balai Pertemuan Kelompok Budi Daya	214,562,000	×
7	Meningkatkan fungsi kawasan penyangga, konservasi dan lindung	Dishutbun	20) Rehabilitasi Hutan dan Lahan	81. Pengembangan Jenis tanaman Bakau Untuk Olahhan Pangan Peningkatan Ekonomi Rakyat	127,767,500	×
				82. Pengambangan Pola Agroforestry	162,055,000	×

Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (APBK/OTSUS T.A 2015)

NO	Kebijakan RPJM Tahun Ketiga (2015)	SKPK Pelaksana	Program	Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)	Kesesuaian Program / Kegiatan dgn Reaksi Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				83. Pengembangan Budidaya Jamur Tiram	143,921,000.00	×
				84. Pengembangan Budidaya Jamur Tiram(DAK)	99,621,200	×
				85. Pengadaan Bibit Tanaman Masyarakat	149,620,000	×
				86. Pengadaan Bibit Kayu Gaharu/Kayu Halim	149,569,000	×
8	Mengembangkan dan memperkuat kemampuan pengelolaan cadangan pangan	Distanak	21) Peningkatan Ketahanan Pangan	87. Pengadaan Benih Padi Unggul	380,653,700	√
				88. Pengembangan Jagung(OTSUS)	552,975,000	√
				89. Penanaman Pisang	149,474,900	√
				90. Pengadaan Bibit Pepaya	39,355,300	√
				91. Pengadaan Bibit Buah Buah	658,843,700	√
				92. Pengadaan Tray Pembibitan Padi	32,592,000	×
		Bepeluh	22) Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan	93. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	97,945,000	×
				94. Pengembangan lumbung pangan desa	150,000,000	×
				95. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Bappeluh	50,000,000	×
		Dinas Pendidikan	23) Program pendidikan anak usia dini	96. Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (Otsus)	982,028,000	√
				97. Pengadaan Mubelair TK(Otsus)	483,965,000	√
				98. Pengadaan Alat Peraga dan Alat Keperluan Lainnya Tk.Melati Dsn.Suka Jadi Kp.Suka Makmur	25,000,000.00	×
				99. Pembangunan Pagar sekolah RA Al-Bayan Kp. Cinta Raja Kec. Bendahara	59,738,000	×
				100. Pengadaan Alat Permainan Luar TK YASPENDI Kec. Bendahara	30,000,000	×
				101. Pembangunan Ruang Kelas Sekolah SD dan SMP (Otsus)	794,828,000	√
				102. Pembangunan Laboratorium dan ruang praktikum sekolah (Otsus)	1,199,015,000	×

Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (APBK/OTSUS T.A 2015)

NO	Kebijakan RPJM Tahun Ketiga (2015)	SKPK Pelaksana	Program	Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)	Kesesuaian Program / Kegiatan dgn Reaksi Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				103. Pembangunan perpustakaan sekolah(Otsus)	847,579,000	√
				104. Pembangunan WC Sehat(Otsus)	215,632,000	×
				105. Pengadaan Komputer (Otsus)	355,688,000	×
				106. Pembangunan Ruang Kelas Sekolah dasar (DAK)	1,647,284,000	√
				107. Pembangunan Ruang Pustaka Sekolah Menengah Pertama(DAK)	272,826,000.00	×
				108. Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar (DAK)	1,726,423,599	√
				109. Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Menengah Pertama (DAK)	830,637,874	√
				110. Pembangunan WC SDN 1 Suka Makmur	49,978,500	×
				111. Pembangunan WC	99,510,000	×
				112. Pengadaan Mobiler	54,540,000	√
				113. Pengadaan Infocus	79,920,000	×
				114. Pengadaan Alat Pendidikan IPS SD (DAK)	234,515,000	×
				115. Pengadaan Alat Pendidikan matematika SD(DAK)	403,838,000	
				116. Pengadaan Alat Pendidikan Bahasa Indonesia SD(DAK)	496,139,000	×
				117. Pengadaan Alat Pendidikan Jasmani,Olahraga dan Kesehatan SD(DAK)	315,026,000.00	×
				118. Pengadaan alat Media Pendidikan (SD inti dan Bermutu)(DAK)	929,311,200.00	×
				119. Pengadaan Alat Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan SD(DAK)	18,750,000	×
				120. Pengadaan Alat Pendidikan IPA SD(DAK)	357,149,000.00	×
				121. Pembanguan Laboratorium Ipa Sekolah Menengah Pertama(DAK)	309,711,000	×
				122. Pembanguan Laboratorium Komputer Sekolah Menengah Pertama(DAK)	229,453,000	×

Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (APBK/OTSUS T.A 2015)

NO	Kebijakan RPJM Tahun Ketiga (2015)	SKPK Pelaksana	Program	Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)	Kesesuaian Program / Kegiatan dgn Reaksi Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				123. Pembangunan Ruang Guru Sekolah Menengah Pertama(DAK)	327.355.000c	×
				124. Pembangunan Rumah dinas Guru Sekolah Menengah Pertama(DAK)	123,457,000	×
				125. Pembangunan Jembatan Sekolah Menengah Pertama(DAK)	166,509,000	×
				126. Pengadaan Alat Pendidikan IPS SMP (DAK)	125,831,000	×
				127. Pengadaan Alat Pendidikan Metematika SMP (DAK)	95,824,000	×
				128. Pengadaan Alat Pendidikan IPA SMP (DAK)	297,500,000	×
				129. Pengadaan Alat Pendidikan Kesenian SMP (DAK)	254,800,000	×
				130. Pengadaan Alat Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SD(DAK)	497,600,000	×
				131. Pengadaan alat Media Pendidikan SD(SiLPA DAK 2010)	276,350,000	×
				132. Pengadaan Alat Pendidikan IPA SD(SiLPA DAK 2010)	35,399,552	×
				133. Pengadaan Alat Media Pendidikan SD(SiLPA DAK 2013)	164,844,000	×
				134. Pengadaan Alat Media Pendidikan Matematika SD(SiLPA DAK 2013)	41,052,000	×
				135. Pengadaan Alat Media Pendidikan IPS SD(SiLPA DAK 2013)	6,064,000	×
				136. Pengadaan Alat Media Pendidikan Matematika SD(SiLPA DAK 2014)	10,263,000	×
				137. Pengadaan peralatan Laboratorium Komputer SMP(SiLPA DAK 2013)	1,782,000,000	×
				138. Pengadan Alat Laboraturium IPA Lengkap SMP(SiLPA DAK 2013)	89,515,000	×
				139. Pengadaan Alat IPS Smp(SiLPA DAK 2013)	9,000,000	×

Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (APBK/OTSUS T.A 2015)

NO	Kebijakan RPJM Tahun Ketiga (2015)	SKPK Pelaksana	Program	Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)	Kesesuaian Program / Kegiatan dgn Reaksi Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				140. Pengadaan Alat Matematika Smp(SiLPA DAK 2013)	6,000,000.00	×
				141. Pengadaan peralatan Laboratorium Komputer SMP(SiLPA DAK 2014)	1,783,140,000.00	×
				142. Pengadaan Alat Pendidikan IPS SMP(SiLPA DAK 2014)	53,862,000	×
				143. Pengadaan Alat Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SMP(SiLPA DAK 2014)	396,350,000	×
				144. Pengadaan Alat Kesenian SMP(SiLPA DAK 2014)	40,000,000	×
				145. Pembangunan Lantai MIN Raja Tuha Kec. Manyak Payed	83,865,000	×
				146. Pengadaan Mubelair MIN Manyak Payed	29,524,000	√
			24) Program pendidikan menengah	147. Penyelenggaraan Paket C setara SMU	60,000,000	√
				148. Lomba Kompetensi siswa(LKS) SMK tingkat Kabupaten	40,000,000	×
				149. Pembangunan Unit Sekolah Baru(Otsus)	0	×
				150. Pembangunan Gedung Sekolah(Otsus)	2,005,363,000.00	√
				151. Pembangunan Ruang Multimedia(Otsus)	533,670,000	×
				152. Pengadaan Alat Lab.IPA(Otsus)	1,372,000,000.00	×
				153. Pengadaan Peralatan Bengkel(Otsus)	965,057,000	×
				154. Pengadaan Komputer(Otsus)	1,535,200,000	×
				155. Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK(DAK)	615,777,000	√
				156. Pembangunan Lab.Termasuk Perabot(DAK)	656,884,000	×
				157. Pembangunan Ruang Praktik SMK(DAK)	603,139,000	×
				158. Pembangunan Perpustakaan dan Perabotnya Untuk SMA(DAK)	272,917,000	×
				159. Pengadaan Buku Referensi SMA(DAK)	189,840,000	×
				160. Pengadaan Buku Referensi SMK(DAK)	70,000,000	×
				161. Pengadaan Peralatan Lab. IPA SMA(DAK)	446,833,000	×

Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (APBK/OTSUS T.A 2015)

NO	Kebijakan RPJM Tahun Ketiga (2015)	SKPK Pelaksana	Program	Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)	Kesesuaian Program / Kegiatan dgn Reaksi Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				162. Pengadaan Peralatan Pendidikan SMK(DAK)	1,695,463,000	×
				163. Pengadaan Peralatan Olahraga(DAK)	433,050,000	×
				164. Rehab Sedang Perpustakaan Termasuk Perabotan SMK(DAK)	74,200,000	×
				165. Rehab Sedang Bengkel Otomotif Termasuk Perabotan SMK(DAK)	73,463,000.00	×
				166. Rehab Sedang Ruang Kelas Termasuk Perabotan SMK(DAK)	146,964,000	×
				167. Pengadaan Peralatan Olahraga SMK(DAK)	199,740,000	×
				168. Pengadaan Peralatan Praktek Siswa SMK Bidang Keahlian Non Teknologi dan Rekayasa(DAK)	302,308,000	×
				169. Pembangunan Jamban Siswa SMA(DAK)	136,484,000	×
				170. Rehab Sedang Lab. Biologi Termasuk Perabot SMA(DAK)	78,725,000	×
				171. Rehab Sedang Ruang Kelas Termasuk Perabotan SMA(DAK)	1,111,805,000	√
				172. Rehab Berat Perpustakaan Termasuk Perabot SMA(DAK)	113,290,000	×
				173. Pengadaan Alat Laboraturium IPA SMA(SiLPA DAK 2013)	445,400,000	×
9	Kebijakan RPJM 2013 2017: Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	25) Obat dan perbekalan kesehatan	174. Pengadaan obat perbekalan kesehatan(DAK)	3,591,055,000	×
				175. Pengadaan Obat dan Pembekalan Kesehatan(Obat Program dan Reagensia)	832,408,419	×
				176. Pengelolaan Obat,Bahan Farmasi dan Pembekalan Kesehatan Kabupaten	27,584,000	×
10	Kebijakan RKPD 2013 : Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan dasar.		26) Upaya kesehatan masyarakat	177. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Posbindu	75,852,000	×
				178. Operasional Pelayanan P3K Perayaan Hari Besar Nasional/Agama	42,990,000.00	×
				179. Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sungai Iyu	597,760,031	×

Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (APBK/OTSUS T.A 2015)

NO	Kebijakan RPJM Tahun Ketiga (2015)	SKPK Pelaksana	Program	Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)	Kesesuaian Program / Kegiatan dgn Reaksi Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				180. Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Simpang Kiri	700,119,742	×
				181. Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sekerak	287,803,050	×
				182. Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sapta Jaya	6,527,243,200	×
				183. Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Rantau	1,155,652,573	×
				184. Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tamiang Hulu	812,067,343	×
				185. Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Seruway	1,485,010,600	×
				186. Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Manyak Payed	1,753,629,925	×
				187. Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Karang Baru	2,220,327,450	×
				188. Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kualasimpang	1,208,133,695	×
				189. Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bendahara	499,663,299	×
				190. Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Banda Mulia	763,750,666	×
				191. Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kejuruan Muda	1,682,121,821	×
				192. Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bnadar Pusaka	707,655,925	×
				193. Non Kapitasi JKN FKTP	2,821,162,800	×
			27) Perbaikan gizi masyarakat	194. Pelayanan Kesehatan Akibat Gizi Buruk	24,756,100	×
				195. Penilaian Status Gizi	31,550,000	×
				196. Pengadaan PMT Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang dan Buruk Serta PMT Balita 3-5 Tahun (PAUD) Otsus	581,018,000	×
				197. Pengadaan PMT Balita Kelompok umur 6-24 Bulan dari Keluarga Miskin	431,136,200	×
			28) Program Pengembangan Lingkungan Sehat	198. Operasional Insenerator Penanganan Limbah Medis di Puskesmas	24,465,000	×
				199. Penyediaan Rumah Pelindung Instalasi Limbah	213,336,000	×
			29) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	200. Pelayanan vaksinasi bagi balita, ibu hamil, anak sekolah dan WUS	55,000,000	×

Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (APBK/OTSUS T.A 2015)

NO	Kebijakan RPJM Tahun Ketiga (2015)	SKPK Pelaksana	Program	Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)	Kesesuaian Program / Kegiatan dgn Reaksi Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				201. Penanggulangan DBD dan Chikungunya	68,964,152	×
				202. Penanggulangan Penyakit TBC, Paru dan Kusta	20,000,000	×
				203. Penanggulangan Malaria	25,000,000	×
				204. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Terpadu	13,374,950	√
				205. Penanganan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah/KLB dan Kajian Investigasi Kasus	23,687,000	×
				206. Pencegahan dan Penanggulangan filariasis(survei dan Penanggulangan penyakit Filariasis di Daerah Endemis/Fokus Filariasis)	23,200,000	×
			30) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	207. Pelayanan Kesehatan akibat gizi buruk/lapar	36,000,000	√
11	Kebijakan RPJM 2013 2017 : - Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana permukiman	DPU	31) Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat	208. Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Kecamatan Manyak Payed	405,126,000	√
				209. Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Kecamatan Seruway	843,384,000	√
				210. Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Kecamatan Bendahara	1,281,279,000	√
12	Kebijakan RKPd 2013 : Pembangunan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman, didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)		32) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	211. Pengembangan Distribusi Air Minum Kecamatan Seruway(DAK)	1,125,528,169	√
				212. Pengembangan Distribusi Air Minum Kecamatan Bendahara(DAK)	99,510,000	√
				213. Pengembangan Distribusi Air Limbah Kecamatan Banda Mulia(DAK)	961,000,000	√
				214. Pengembangan Distribusi Air Minum Kecamatan Kota Kualasimpang(DAK)	347,233,047	√
				215. Pengembangan Distribusi Air Minum Kecamatan Taminag hulu(DAK)	1,475,673,369	√

Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (APBK/OTSUS T.A 2015)

NO	Kebijakan RPJM Tahun Ketiga (2015)	SKPK Pelaksana	Program	Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)	Kesesuaian Program / Kegiatan dgn Reaksi Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				216. Pengembangan Distribusi Air Limbah Kecamatan Seruway(DAK)	1,600,187,000	√
				217. Pengembangan Distribusi Air Limbah Kecamatan Bendahara(DAK)	99,510,000	√
				218. Pengembangan Distribusi Air Limbah Kecamatan Kejuruan Muda	198,485,000	√
				219. Pengembangan Distribusi Air Limbah Kecamatan Tenggulun	213,290,000	√
				220. Pengembangan Distribusi Air Minum kecamatan Karang Baru	198,488,000	√
				221. Pengembangan Distribusi Air Limbah Kecamatan Seruway	83,855,000	√
				222. Pengembangan Distribusi Air Minum Kecamatan Kejuruan Muda	198,485,000	√
			33) Program Pengembangan Perumahan	223. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat Sederhana Kecamatan Manyak Payed (Otsus)	1,376,404,000	×
				224. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat Sederhana Kecamatan Banda Mulia (Otsus)	1,280,506,000	×
				225. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat Sederhana Kecamatan Bendahara (Otsus)	1,280,467,000	×
				226. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat Sederhana Kecamatan Seruway (Otsus)	1,280,875,000	×
				227. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat Sederhana Kecamatan Rantau (Otsus)	1,278,816,000	×
				228. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat Sederhana Kecamatan Kota Kualasimpang (Otsus)	1,278,491,000	×

Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (APBK/OTSUS T.A 2015)

NO	Kebijakan RPJM Tahun Ketiga (2015)	SKPK Pelaksana	Program	Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)	Kesesuaian Program / Kegiatan dgn Reaksi Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				229. Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Kecamatan Karang Baru (Otsus)	1,279,804,000	×
				230. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat Sederhana Kecamatan Sekerak (Otsus)	1,280,901,200	×
				231. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat Sederhana Kecamatan Kejuruan Muda (Otsus)	1,280,181,000	×
				232. Pembangunan Sarana dan Prasana Rumah Sehat Sederhana Kecamatan Tenggulun (Otsus)	1,281,052,000	×
				233. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat Sederhana Kecamatan Tamiang Hulu (Otsus)	1,281,000,000	×
				234. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat Sederhana Kecamatan Bandar pusaka (Otsus)	1,281,000,000	×
				235. Pembangunan Rumah Layak Huni	74,467,500	×
				236. Rehabilitasi Rumah Dhuafa	456,174,000	×
				237. Pembangunan Rumah Dhuafa	1,701,198,800	×
T O T A L					105,078,794,043	
Keterangan : √ : Sesuai dengan rencana aksi daerah/SPKD × : Tidak sesuai dengan rencana aksi daerah/SPKD						

Tabel di atas menginformasikan bahwa total pembiayaan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang yang didanai oleh APBK/OTSUS/DAK Tahun Anggaran 2017, adalah sebesar Rp. 105,078,794,043,- (seratus lima milyar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh empat empat puluh tiga rupiah), dengan jumlah program dan kegiatan sebanyak 36 program dan 241 kegiatan.

Dari 36 program dan 241 kegiatan tersebut, teridentifikasi bahwa 189 kegiatan (78%) tidak sesuai dengan rencana aksi daerah sebagaimana yang tertuang dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2013 – 2017, ini berarti bahwa 52 kegiatan (22%) yang sesuai, namun kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan pendukung program penanggulangan kemiskinan. Sedangkan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap program terkait pada tahun 2017, telah dilaksanakan oleh beberapa SKPK, seperti pada tabel berikut :

Tabel III.2 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi SKPK

NO	KEGIATAN	SKPK PELAKSANA	ANGGARAN (Rp)
1.	Monitoring pelaksanaan pendistribusian RASKIN RTS-PM	Dinas Sosial	100.000.000
2.	Monitoring pendistribusian LPG Tabung 3kg	Dinas Sosial	100.000.000
3.	Monitoring pelaksanaan pupuk bersubsidi dan pestisida	Setdakab	100.000.000
TOTAL			258.350.100

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017

III.3 Evaluasi APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan

III.3.1 Analisis Pendapatan Daerah

Sumber penerimaan/pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri seperti dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan yang diperoleh diluar dari

PAD dan Dana Perimbangan, yaitu berupa pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri.

Tabel III.3 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang 2015 – 2017

Uraian	Realisasi Tahun 2015	%	Realisasi Tahun 2016	%	Realisasi Tahun 2017	%
PENDAPATAN	1,115,346,582,147.46	100.00	1,326,988,469,719.43	100.00	1,241,189,072,017.00	100.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	100,454,203,156.60	9.01	114,051,092,363.75	8.59	128,487,282,902.00	10.35
Pendapatan Pajak Daerah	8,369,007,319.00	8.33	8,643,457,946.30	7.58	15,609,578,520.00	12.15
Pendapatan Retribusi Daerah	7,424,803,813.00	7.39	30,476,102,499.25	26.72	11,566,569,506.00	9.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4,264,941,292.00	4.25	5,963,629,755.19	5.23	6,364,937,098.00	4.95
Zakat					10,000,000,000.00	
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	80,395,450,732.60	80.03	68,967,902,163.01	60.47	84,946,197,778.00	66.11
PENDAPATAN TRANSFER	1,014,892,378,990.86	90.99	1,023,833,054,473.82	77.15	766,184,655,000.00	61.73
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	724,104,955,568.00	71.35	863,883,794,168.00	84.38	766,184,655,000.00	100.00
Dana Bagi Hasil Pajak	72,043,092,200.00	9.95	69,670,327,145.00	8.06		0.00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	11,996,450,368.00		4,957,719,901.00			
Dana Alokasi Umum	486,741,323,000.00	67.22	542,165,803,000.00	62.76	622,624,239,000.00	81.26
Dana Alokasi Khusus	153,324,090,000.00	21.17	247,089,944,122.00	28.60	143,560,416,000.00	18.74
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	266,910,357,443.00		127,703,241,000.00	12.47		0.00
Dana Otonomi Khusus	126,829,640,443.00					
Dana Penyesuaian	140,080,717,000.00		127,703,241,000.00	12.47		0
Transfer Pemerintah Provinsi	23,877,065,979.86		32,246,019,305.82	3.15		0.00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	23,877,065,979.86		32,246,019,305.82	3.15		0
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0	0	189,104,322,881.86	14.25	346,517,134,115.00	27.92
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya					27,284,689,308.00	
- Pendapatan Dana BOS						
Pendapatan Hibah			55,980,596,000.00	29.60		0.00
Pendapatan Lainnya			133,123,726,881.86	70.40		0.00
Dana Penyesuaian					149,383,161,807.00	
Dana Desa dari APBN					162,349,283,000.00	
Dana Insentif Daerah					7,500,000,000.00	

Realisasi pendapatan daerah tahun 2015 sebesar Rp. 1.115.346.582.147,46,- di tahun 2016 terjadi peningkatan realisasi pendapatan daerah menjadi sebesar Rp. 1.326.988.469.719,43,-. Pada tahun 2017 terjadi penurunan pendapatan daerah menjadi sebesar Rp. 1.241.189.072.017,-

dikarenakan transfer dari pusat yaitu Dana Alokasi Khusus yang mengalami penurunan.

Kemandirian pembiayaan daerah yang dapat dilihat dari kontribusi PAD terhadap komponen pendapatan daerah secara keseluruhan terus menerus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 merupakan tahun dimana pertumbuhan PAD tertinggi bila dibandingkan dengan tahun-tahun selanjutnya yaitu sebesar 103,69%. Akan tetapi pertumbuhan yang tinggi ini memberikan kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah hanya sebesar 9,01%, selanjutnya ditahun 2016 kontribusi PAD hanya sebesar 8,59%. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tamiang ini masih dikategorikan sangat kecil/kurang yaitu dibawah 10% yang menggambarkan bahwa derajat otonomi fiskal Kabupaten Aceh Tamiang masih berada pada kriteria sangat kurang (0,00% - 10,00%), bila dianalisis secara keseluruhan realisasi pendapatan, Kabupaten Aceh Tamiang masih sangat tergantung dari transfer pemerintah pusat dalam menjalankan pembangunan dan roda pemerintahan yang ditunjukkan dari proporsi Dana Perimbangan yang begitu besar dari keseluruhan Pendapatan Daerah. Hal ini menggambarkan bahwa Kabupaten Aceh Tamiang belum dapat membiayai sendiri program-program daerah yang dijalankan dan dapat mengakibatkan program-program yang sudah direncanakan selama beberapa tahun akan putus ditengah jalan dikarenakan berkurangnya transfer dari Pemerintah Pusat.

III.3.2 Analisis Belanja Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan

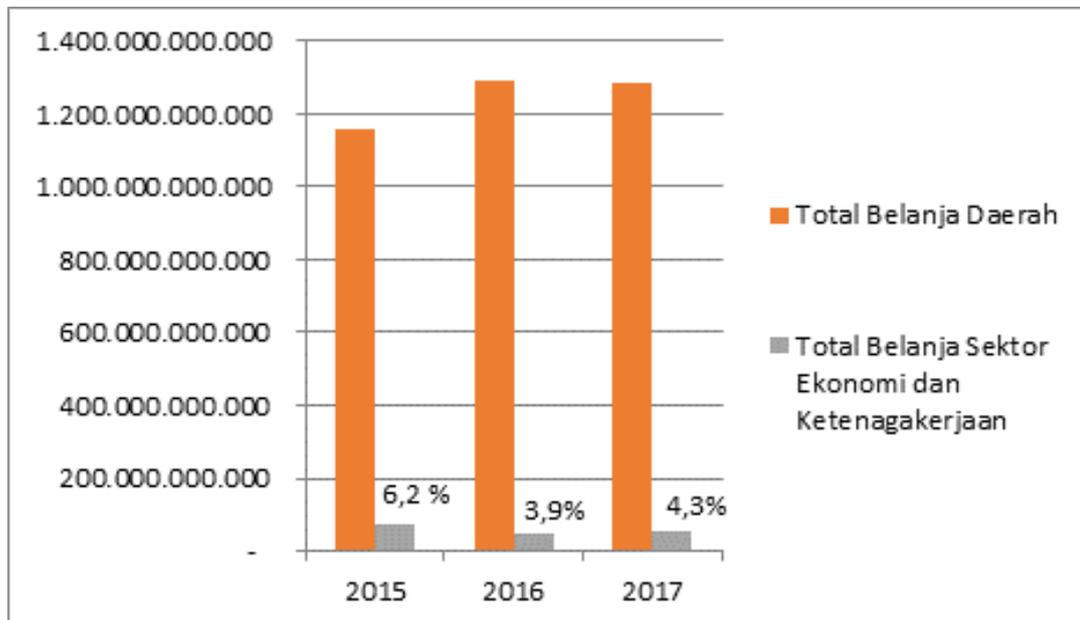
Analisis belanja daerah Kabupaten Aceh Tamiang untuk Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan melihat belanja program/kegiatan reguler yang dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Adapun belanja daerah ini akan dipilah berdasarkan sektor/dimensi kemiskinan yang akan diselaraskan dengan permasalahan kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu :

1. Dimensi Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Ekonomi dan Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan bagaimana keadaan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang.

Dari dimensi ini terlihat berapa jumlah penduduk miskin serta tingkat kemiskinannya. Oleh karena itu dimensi ekonomi dan ketenagakerjaan ini perlu menjadi perhatian khusus. Kabupaten Aceh Tamiang telah mengalokasikan belanja sektor ekonomi dan ketenagakerjaan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan seperti yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar III.1 Proporsi Belanja Sektor Ekonomi dan Ketenagakerjaan terhadap Total Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang

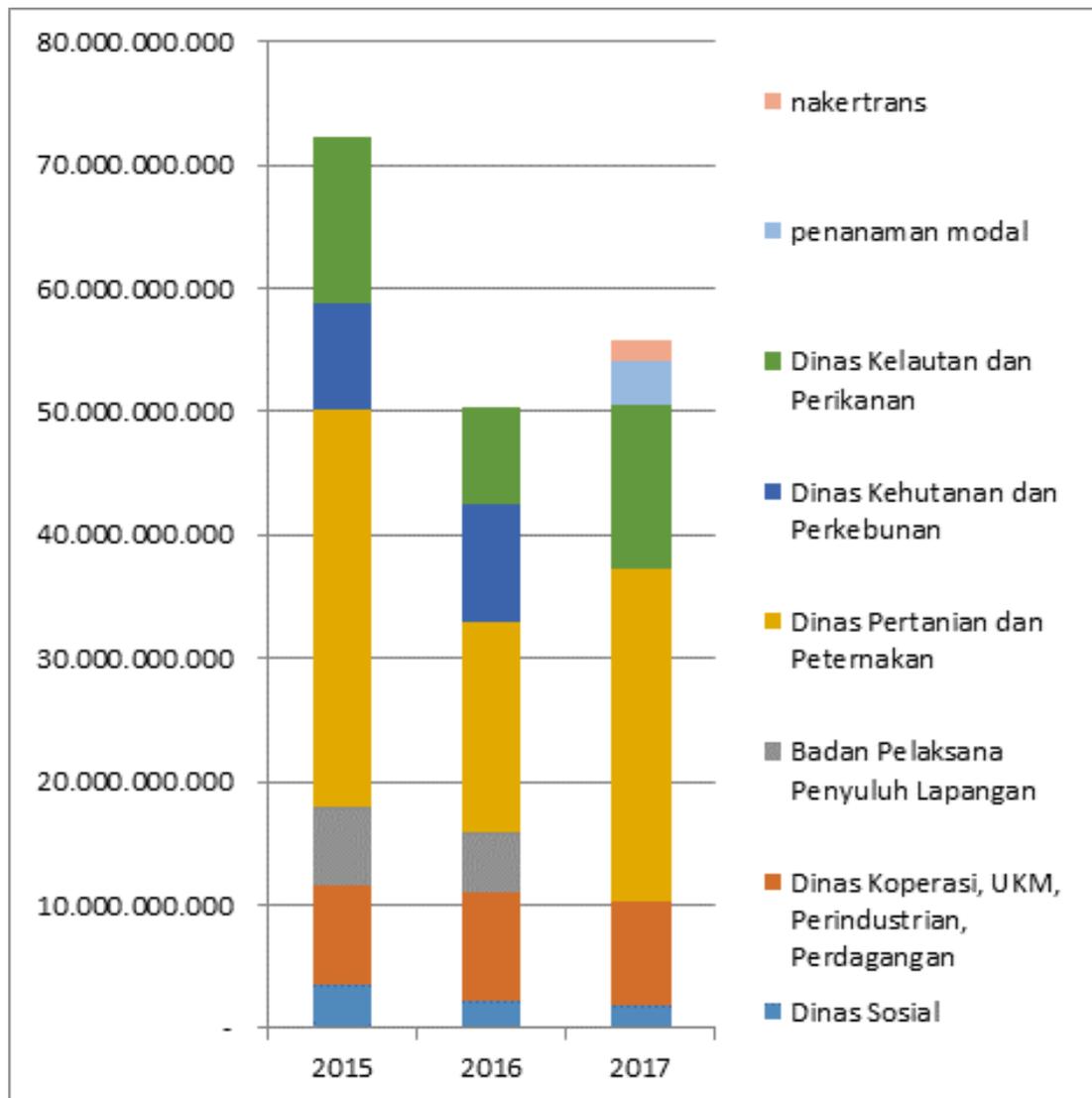


Belanja sektor ekonomi dan ketenagakerjaan merupakan gabungan dari anggaran belanja dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang berbeda urusan pemerintahan daerah yang fokus pada urusan ekonomi dan ketenagakerjaan. Gambar diatas menjelaskan bahwa pada tahun 2015 anggaran belanja sebesar Rp. 72.333.662.018,- dengan persentase sebesar 6,2% dibandingkan dengan total belanja daerah. Selanjutnya pada tahun 2016 terus terjadi penurunan anggaran belanja menjadi sebesar Rp.50.345.291.250,- dengan persentase yang menurun menjadi 3,9% dibandingkan dengan total belanja daerah. Ditahun 2017 anggaran belanja sektor ekonomi naik sedikit menjadi Rp. 55.811.534.129,- dengan persentase sebesar 4,3% dari total belanja daerah. Analisis diatas menunjukkan bahwa anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk sektor ini relatif masih tergolong kecil dan terus mengalami

penurunan pada kurun waktu 3 tahun yaitu dibawah 10% dari total belanja Kabupaten Aceh Tamiang.

Dari keseluruhan belanja sektor ekonomi dan ketenagakerjaan yang merupakan gabungan dari beberapa SKPK dapat dilihat proporsinya pada gambar dibawah ini.

Gambar III.2 Proporsi Total Belanja Sektor Ekonomi dan Tenaga Kerja di Kabupaten Aceh Tamiang

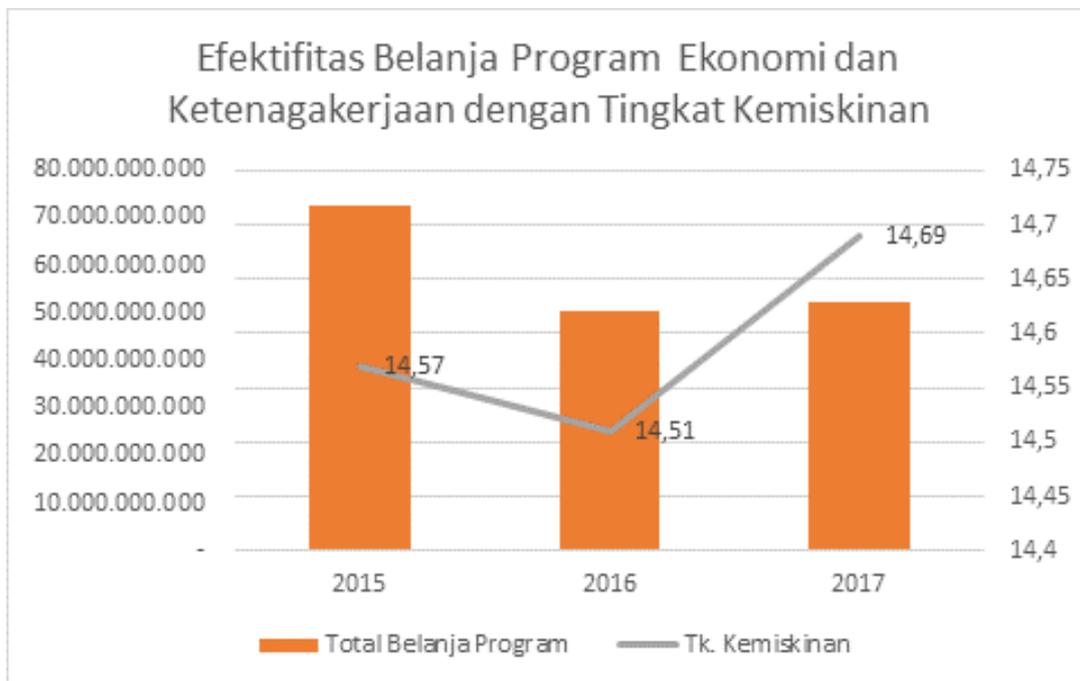


Dari keseluruhan belanja sektor ekonomi dan tenaga kerja, proporsi belanja yang terbesar dari tahun 2015 hingga 2017 yaitu urusan pilihan pertanian walaupun mengalami penurunan anggaran di tahun 2016. Pada tahun 2015 anggaran belanja untuk urusan pertanian sebesar Rp. 32.397.284.866,-

kemudian menurun menjadi sebesar Rp. 17.116.604.177,- ditahun 2016 dan naik kembali di tahun 2017 menjadi sebesar Rp.27.033.701.646,-. Selain dari pada itu, urusan pertanian merupakan penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Aceh Tamiang. Proporsi terbesar selanjutnya ada pada beberapa urusan yaitu urusan Pangan, Kelautan dan Perikanan, kehutanan dan perkebunan di tahun 2015 sampai 2016 dikarenakan perpindahan kewenangan ke Pemerintah Provinsi di tahun 2017, koperasi perindustrian dan perdagangan serta urusan sosial tenaga kerja dan transmigrasi.

Perbandingan antara total belanja sektor ekonomi dan ketenagakerjaan dengan angka kemiskinan dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar III.3 Efektifitas Belanja Sektor Ekonomi dan Ketenagakerjaan terhadap Angka Kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang



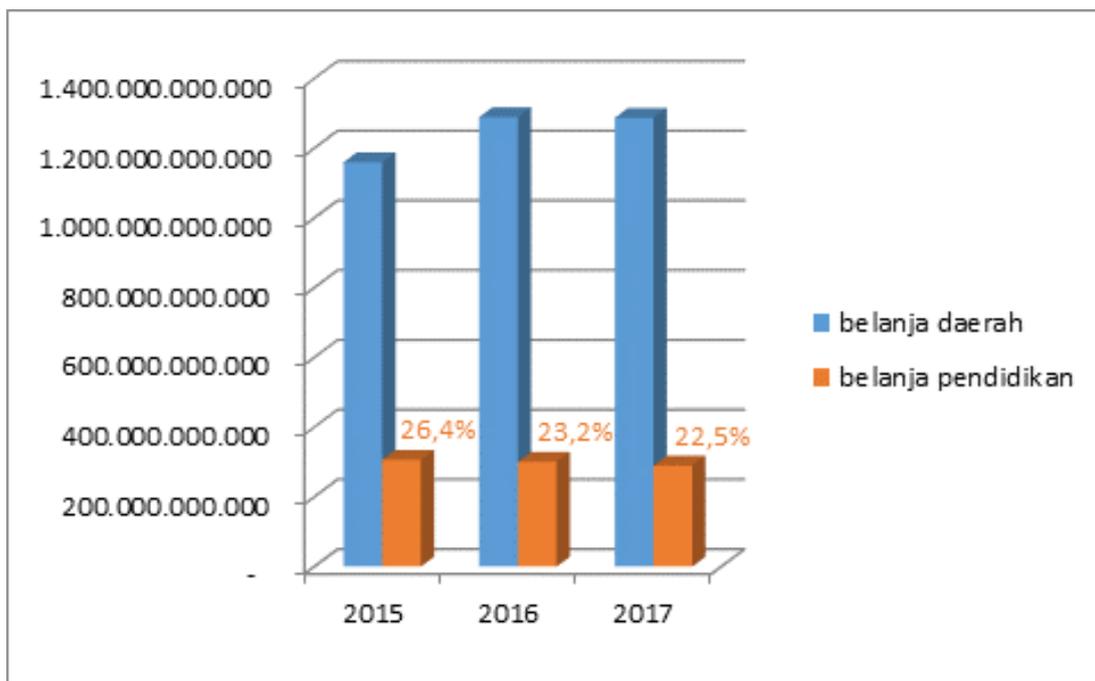
Tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang dari tahun 2015 (14.57%) sampai dengan 2017 (14.69%) mengalami fluktuasi wdengan kecenderungan menaik terutama dilihat pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah yang berhubungan dengan program/kegiatan dalam pengentasan kemiskinan tidak tepat sasaran dan berjalan tidak efektif sehingga mulai mendekati kejenuhan. Tingkat kejenuhan ini sangat membutuhkan inovasi

dalam pemilihan program/kegiatan pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan agar tingkat kemiskinan dapat turun lebih cepat.

2. Dimensi Pendidikan

Belanja daerah Kabupaten Aceh Tamiang untuk sektor pendidikan semakin menurun pada tiga tahun terakhir meskipun belanja daerah terus meningkat. Proporsi total belanja daerah terhadap total belanja sektor pendidikan pada gambar dibawah ini.

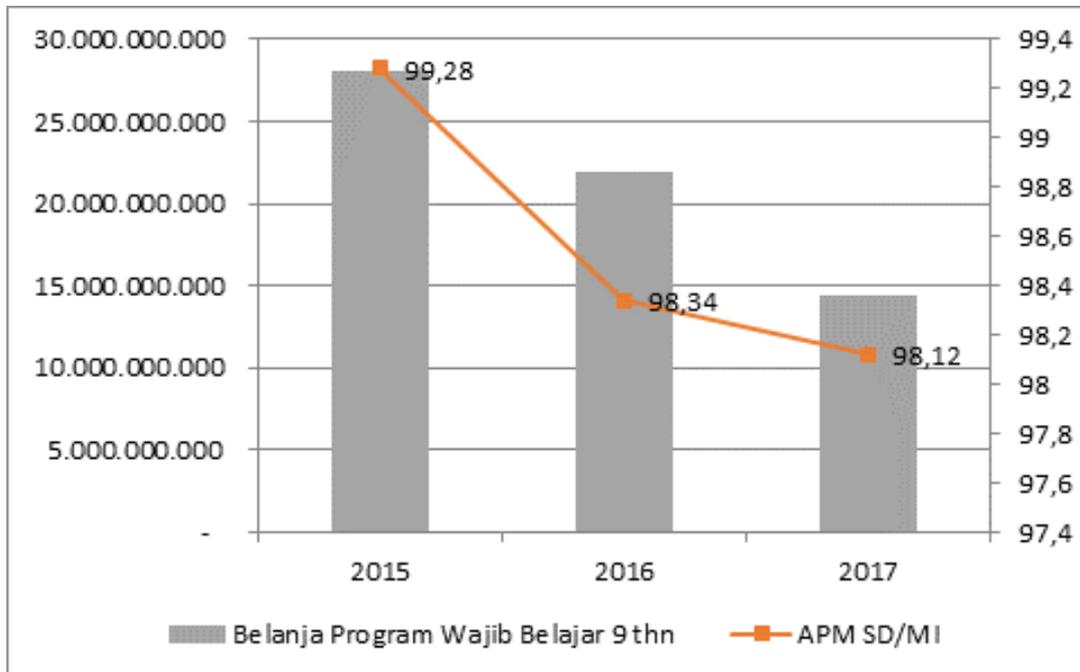
Gambar III.4 Proporsi Total Belanja Daerah dengan Total Belanja Sektor Pendidikan



Pada tahun 2015 persentase belanja pendidikan sebesar 26,4% dari total belanja daerah dengan anggaran belanja pendidikan sebesar Rp.305.953.942.099,-. Pada tahun 2016, belanja sektor pendidikan semakin menurun baik anggaran (Rp.299.607.732.613,-) maupun persentasenya sebesar 23,2%. Pada tahun 2017 terjadi penurunan persentase menjadi sebesar 22,5% dan anggaran belanja pendidikan menjadi sebesar Rp.289.013.284.415,-. Hal ini terjadi karena belanja daerah Kabupaten Aceh Tamiang lebih difokuskan pada belanja peningkatan sarana dan prasarana jalan dan jembatan untuk mensukseskan visi misi Bupati periode 2013-2018.

Permasalahan kemiskinan sektor pendidikan dapat dilihat pada beberapa indikator yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA. Perbandingan antara belanja program pendidikan menengah dengan APK SMA/MA dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar III.5 Efektifitas Anggaran Belanja Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun terhadap APM SD/MI Di Kabupaten Aceh Tamiang

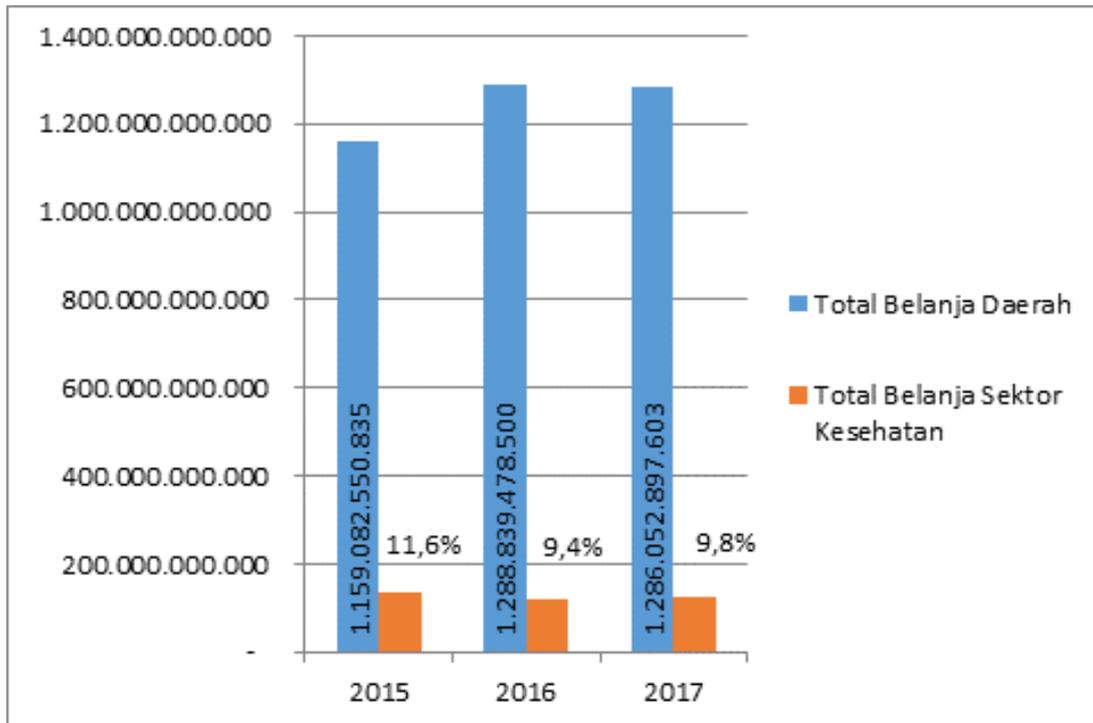


Gambar diatas menunjukkan terjadinya sinkronisasi antara belanja program wajib belajar Sembilan tahun dengan pencapaian nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI yang berarti menurunnya belanja program diikuti dengan menurunnya pencapaian APM SD/MI sehingga menjelaskan bahwa belanja program ini mempengaruhi pencapaian APM SD/MI. Pada tahun 2015 anggaran belanja program wajib belajar Sembilan tahun sebesar Rp. 28.107.995.581,- dengan capaian APM (99.28%), tahun 2016 belanja sebesar Rp. 21.860.028.700,- dengan nilai APM (98.43%) dan tahun 2017 belanja program sebesar Rp. 14.393.220.400,- dengan nilai APM (65.06%).

3. Dimensi Kesehatan

Total anggaran belanja Kabupaten Aceh Tamiang terjadi penurunan di tahun 2017 namun tidak berbanding lurus dengan proporsi total belanja sektor kesehatan yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar III.6 Proporsi Total Belanja Sektor Kesehatan terhadap Total Belanja APBD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015-2017

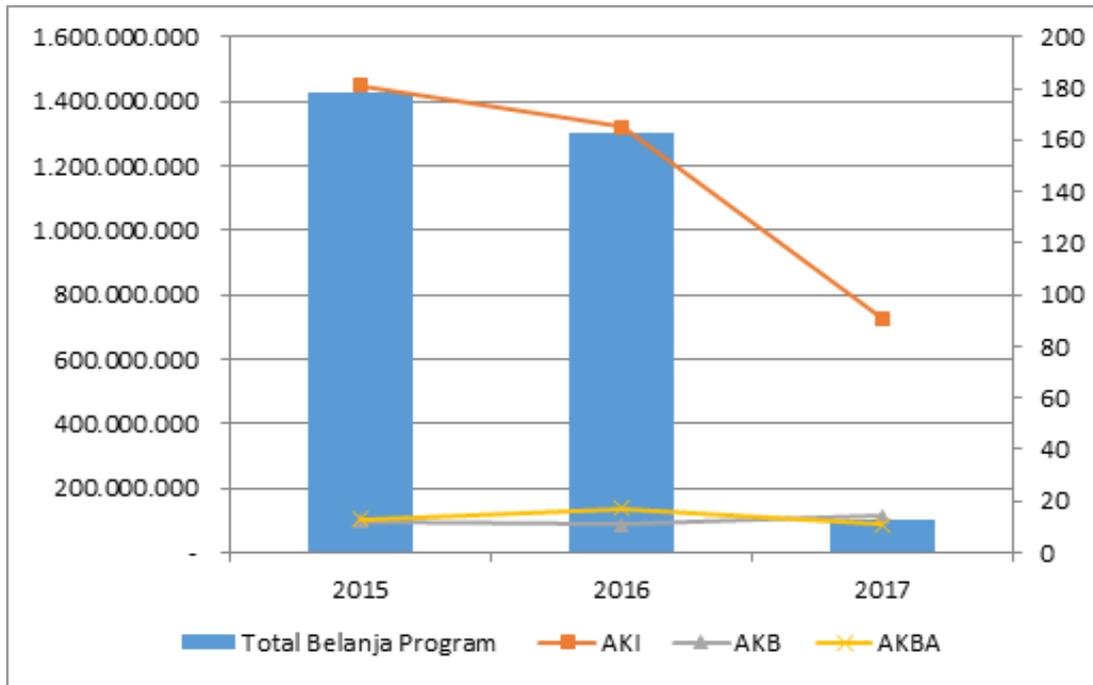


Belanja daerah Kabupaten Aceh Tamiang mengalami peningkatan di tahun 2015 sebesar Rp. 1.159.082.550.835,- dan 2016 sebesar Rp. 1.288.839.478.500,- namun terjadi penurunan di tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 1.286.052.897.603,-. Berbanding terbalik dengan total belanja sektor kesehatan terjadi penurunan di tahun 2015 (11,6%) menjadi 9,4% di tahun 2016 kemudian naik di tahun 2017 menjadi sebesar 9,8% dari total belanja daerah.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran belanja untuk sektor kesehatan belum memenuhi mandat nasional yaitu 10% dari belanja APBD pada dua tahun terakhir.

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Aceh Tamiang pada sektor kesehatan yaitu tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Indikator-indikator diatas merupakan indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. Perbandingan antara belanja program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak dengan AKI, AKB dan AKBA dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar III.7 Efektifitas Anggaran Belanja Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak terhadap AKI, AKB, dan AKBA



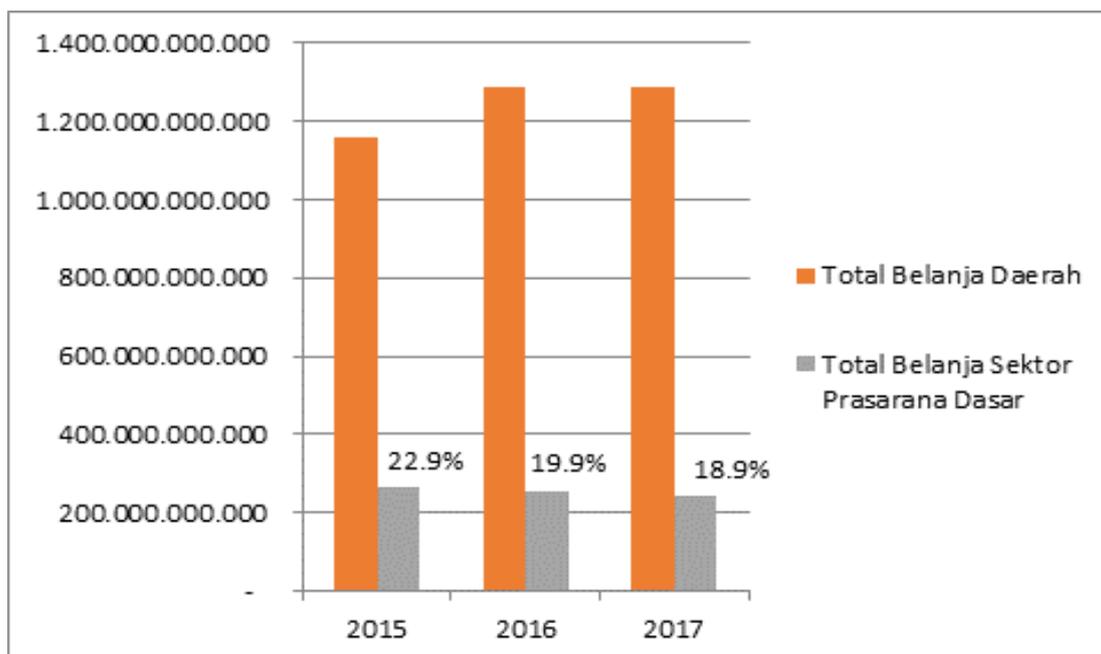
Pada tahun 2015, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.785.866.700,- dan hasil pencapaian nilai AKI sebesar 181 jiwa per 100.000 kelahiran hidup dan AKB sebesar 12,00 jiwa per 1.000 kelahiran hidup serta AKBA sebesar 12,70 jiwa per 1.000 kelahiran hidup, anggaran belanja ini berbanding terbalik dengan penurunan AKI, namun berbanding lurus dengan AKB dan AKBA. Pada tahun 2016, realisasi anggaran menurun menjadi Rp. 1.305.058.200,- dan hasil pencapaian nilai AKI naik menjadi 165 jiwa per 100.000 kelahiran hidup dan AKB menurun menjadi 11,00 jiwa per 1.000 kelahiran hidup serta AKBA sebesar 12,00 jiwa per 1.000 kelahiran hidup, penurunan anggaran ini berbanding terbalik dengan penurunan AKI, AKB dan AKBA. Pada tahun 2017, realisasi anggaran sebesar Rp. 104.999.500,- dan hasil pencapaian nilai AKI sebesar 91 jiwa per 100.000 kelahiran hidup dan AKB sebesar 14,00 jiwa per 1.000 kelahiran hidup serta AKBA sebesar 11,00 jiwa per 1.000 kelahiran hidup, anggaran belanja ini berbanding terbalik dengan penurunan AKI dan AKBA, namun berbanding lurus dengan AKB. Dari data-data diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran tidak mempengaruhi keberhasilan Dinas Kesehatan dalam menekan dan menurunkan indikator AKI, AKB dan AKBA. Walaupun anggaran semakin

menurun tetapi ketercapaian AKI, AKB, AKBA berhasil diturunkan sedangkan kondisi normalnya apabila anggaran menurun maka kemungkinan ketercapaian AKI, AKB, dan AKBA akan meningkat dan ini hal yang tidak diharapkan.

4. Dimensi Prasarana Dasar

Prasarana dasar merupakan salah satu indikator yang menggambarkan bagaimana keadaan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang. Minimnya keadaan prasarana dasar suatu masyarakat atau komunitas akan mencerminkan keadaan kemiskinannya. Prasarana dasar yang baik dan terpenuhi akan menunjang tingkat kesehatan dan pendidikan seseorang, dan keadaan ini akan meningkatkan derajat kesejahteraan suatu masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah mengalokasikan belanja sektor prasarana dasar untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan seperti yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar III.8 Proporsi Total Belanja Sektor Prasarana Dasar terhadap Total Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang

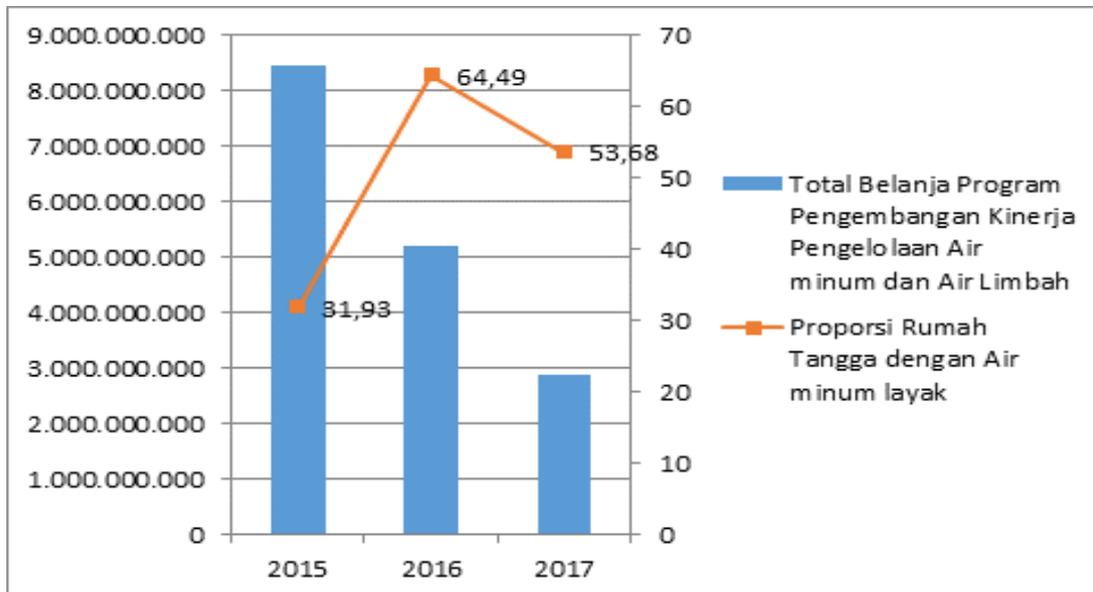


Dari gambar diatas menunjukkan bahwa proporsi anggaran belanja sektor prasarana dasar terjadi penurunan seiring dengan total belanja daerah yang terjadi fluktuasi dan menurun di tahun 2017.

Pada tahun 2015 belanja sector prasarana dasar mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 236.149.190.780,- atau sebesar 20,4% dari total belanja daerah. Pada tahun 2016, terjadi penurunan anggaran di sector ini menjadi sebesar Rp. 255.872.754.126,- atau sekitar 19,9% dari total belanja daerah. Pada tahun 2017 belanja sector prasarana dasar sebesar Rp. 243.369.361.699,- atau sekitar 18,9% dari total belanja daerah.

Efektifitas anggaran program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah terhadap proporsi rumah tangga dengan air minum layak dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar III.9 Efektifitas Anggaran Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum dan Air Limbah terhadap Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak



Pada tahun 2015, realisasi anggaran belanja program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah sebesar Rp. 8.466.475.554,- dengan pencapaian proporsi RT dengan air minum layak meningkat menjadi sebesar 31.93%. Ditahun 2016 belanja program ini menurun menjadi sebesar Rp.5.212.892.479,- dan pencapaian naik tajam menjadi 64.49%. pada tahun 2017 belanja program semakin menurun menjadi sebesar Rp. 2.529.789.000,- dengan pencapaian proporsi RT dengan air minum layak menurun drastis menjadi sebesar 53.68%. Analisis diatas menggambarkan bahwa penurunan anggaran mempengaruhi pencapaian proporsi RT dengan air minum layak.

BAB IV

KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

IV.1 Kelembagaan TKPK

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional dan daerah yang dilaksanakan melalui strategi, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara terkoordinasi dari tingkat pusat sampai daerah dan sesuai dengan Misi Bupati Kabupaten Aceh Tamiang nomor 3 dan 4 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan optimalisasi pemanfaatan potensi unggulan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam hal penanggulangan kemiskinan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan bab I ketentuan umum pasal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk menindak lanjuti maka Kabupaten Aceh Tamiang Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 di bawah naungan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 515 Tahun 2017. Adapun tugas dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang
2. Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang
3. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Aceh Tamiang

Dalam kelembagaan TKPK Kabupaten Aceh Tamiang yang menjadi Ketua TKPK adalah Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang dan dalam pelaksanaan tugasnya TKPK bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang. Anggaran yang di sediakan untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2017 sebesar Rp. 141.500.000,- (seratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

IV.2 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di butuhkan dalam menggalang sinergi pelaksanaan Program Penagggulan Kemiskinan. Kabupaten Aceh Tamiang telah melakukan kegiatan koordinasi dengan SKPD yang terkait. Pada tahun 2017 Rapat Koordinasi dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun dengan agenda sebagai berikut :

Rapat Koordinasi

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang menggelar Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang pada hari Rabu, 23 Agustus 2017, bertempat di aula Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang selaku Ketua Sekretariat Tim TKPK, serta dihadiri oleh para Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang serta tim LP2KD dari Provinsi Aceh.

Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rencana aksi yang termuat dalam dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah tahun 2013-2017 serta sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LPPKD) tahun 2017.

Pokok Pembahasan rapat adalah tentang Kegiatan Mekanisme Pemutakhiran Data Mandiri dilaksanakan sebagai penyempurnaan dari Basis Data Terpadu. Dilihat karna banyaknya kelemahan dari BDT seperti data yang kurang akurat, data penduduk / NIK tidak sesuai, data tidak ditemukan dilapangan, ada rumah tangga yang lebih layak masuk BDT dan kondisi RT di BDT tidak sesuai dengn yang dilapangan. Kegiatan MPM adalah implementasi pasal 9 UU Nomor 13 tahun 2017. Adapun alur dari MPM adalah :

- a. Pendaftaran : pendaftar mendatangi petugas atau sebaliknya. Pendaftar menunjukkan KTP dan KK.

- b. Identifikasi Awal : adalah Pencocokan Data Rumah Tangga pendaftar dengan Data Terpadu PPFM dan Penetapan daftar rumah tangga yang akan diverifikasi/validasi (prelist).
- c. Verifikasi Rumah Tangga : adalah Menggunakan Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu PPFM dan Data elektronik hasil pendataan dikirimkan ke Pokja Pengelola Data Terpadu PPFM
- d. Pemutakhiran Data Terpadu PPFM : Pemingkatan ulang rumah tangga lama dan baru Menggunakan metode PMT
- e. Pemutakhiran Daftar Sasaran Penerima Program : Menggunakan Basis Data Terpadu yang sudah dimutakhirkan dengan Kriteria sasaran penerima program ditetapkan oleh K/L

Adapun petugas yaitu petugas verifikasi rumah tangga yang bertempat di Kecamatan/Desa/Kampung. Tugasnya melaksanakan pendataan pada rumah tangga dalam prelist dan melaksanakan entri data hasil verifikasi . selanjutnya Petugas Penanggung-jawab Sistem Informasi Manajemen (SIM) berlokasi di kabupaten/Kota bertugas Mengintegrasikan Data Terpadu PPFM ke dalam SIM penunjang MPM, Membangun/supervisi instalasi aplikasi pendukung MPM dan Memastikan kelengkapan dan konsistensi data sebelum pengiriman ke Pokja Pengelola Data Terpadu. Yang sebaiknya dilakukan oleh Kabupaten ialah Pembentukan Forum Data (berbagai instansi terkait), Penyusunan Perbup tentang satu data Aceh Tamiang Untuk Penanggulangan Kemiskinan , Penyusunan Perbup tentang Pemutakhiran Data Terpadu dan penyusunan Surat Edaran Bupati tentang pelaksanaan MPM di Gampong . Saat ini sudah ada 12 Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan MPM. Di dalam Program MPM ini masyarakat di haruskan untuk mendaftar sendiri maka akan ada kendala yang terjadi dilapangan. Kendala yang mungkin terjadi dilapangan adalah banyak masyarakat yang tidak masuk katagori masyarakat miskin akan ikut mendaftar. Dalam hal ini harus ada kebijakan pemerintah untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut.

Kabupaten Aceh Tamiang, TKPK melakukan koordinasi penyusunan SPKD Kabupaten Aceh Tamiang sebagai dasar penyusunan RPJMD Kabupaten Aceh

Tamiang dibidang penanggulangan kemiskinan, mengkoordinasikan SKPK atau gabungan SKPK bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPK, penyusunan rancangan RKPD, penyusunan rencana kerja SKPK dan koordinasi evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan. TKPK Kabupaten Aceh Tamiang menyelenggarakan fungsi pengendalian, pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah, penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program secara periodik, pengendalian penanganan pengaduan masyarakat dan penyiapan laporan pelaksanaan dan capaian program kepada Bupati dan TKPK Provinsi.

IV.3 Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan

IV.3.1 Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan

Monitoring dan Evaluasi program penanggulangan kemiskinan pada Lembaga pemerintah dilakukan secara internal oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kebijakan dan program, serta mengukur dampak kebijakan dan program- program penanggulangan kemiskinan.

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim TKPK Aceh Tamiang meliputi:

1. Evaluasi dan Sinkronisasi Dokumen-Dokumen Perencanaan

Dokumen-Dokumen Perencanaan yang dimaksud berupa :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Tamiang.
- b. Rencana Strategis (Renstra) SKPK.
- c. Rencana Kerja (Renja)SKPK yang terkait dengan program penanggulangan kemiskinan.
- d. Dokumen Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya Kabupaten Aceh Tamiang yang merupakan dokumen perencanaan terpadu yang mengacu pada arahan kebijakan

nasional dengan memperhatikan potensi serta masalah daerah akan meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan terutama oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

- e. Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Aceh Tamiang. Pada evaluasi ini, tim TKPK beserta perwakilan SKPK mengevaluasi dan mensinkronisasi dokumen perencanaan untuk memastikan bahwa program-program kemiskinan yang tercantum pada rencana aksi daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang termuat pada dokumen SPKD terakomodir dalam dokumen perencanaan lainnya.

2. Monitoring Program Kemiskinan

Kegiatan monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan (stakeholders) penanggulangan kemiskinan. Keberhasilan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perlu dilandasi oleh kejujuran, motivasi dan kesungguhan yang kuat oleh para pemangku kepentingan.

Berikut beberapa program yang berdampak untuk menanggulangi kemiskinan dari beberapa SKPD yang terkait diantaranya :

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang.
- b. Program Kesejahteraan Petani yang dilakukan oleh Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang.
- c. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan dilakukan oleh Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang.
- d. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang
- e. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang
- f. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang dilaksanakan di Bagian Ekonomi Sekretariat Kabupaten Aceh Tamiang yang meliputi

kegiatan Monitoring Pelaksanaan Raskin / Rastra KPM, Monitoring pelaksanaan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg dan Pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida.

- g. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera.

IV.3.2 Penanganan Pengaduan Masyarakat

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 671/4809/SJ tentang Dukungan penanganan Pengaduan dalam Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran maka pada tahun 2017 Kabupaten Aceh Tamiang menyediakan wadah penanganan pengaduan masyarakat yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang.

Kebijakan subsidi listrik secara Nasional merupakan kegiatan prioritas pengelolaan subsidi energi yang lebih efisien, transparan dan tepat sasaran dalam prioritas nasional adalah kedaulatan energi melalui optimalisasi kebijakan tarif dan subsidi energi energi dan listrik. Peranan Bupati Kabupaten Aceh Tamiang adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan penanganan pengaduan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran dan melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan pihak terkait setempat untuk mendukung dan memastikan keamanan pelaksanaan, termasuk proses penampungan keluhan dan pengaduan masyarakat. PT PLN (Persero) juga memiliki peran melayani pengaduan bagi masyarakat yang datang langsung ke PLN, distribusi formulir pengaduan subsidi, mendampingi petugas kecamatan dalam penggunaan aplikasi dan sosialisasi subsidi (termasuk brosur, poster, banner dan lain-lain).

Tujuan dari pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran adalah untuk memastikan agar subsidi listrik hanya di berikan kepada kelompok masyarakat tidak mampu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dan Undang-Undang nomor 30 tahun 2007 tentang energi. Sasaran dari kebijakan subsidi listrik tepat sasaran ini adalah rumah tangga miskin dan tidak mampu yang tersambung dengan daya listrik 900VA dan terdapat di dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang dikelola oleh Kementerian Sosial dan TNP2K melalui Kelompok Kerja Pengelolaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

BAB V

PENUTUP

Acuan dasar penanggulangan kemiskinan secara filosofi terkandung dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Kemiskinan tidak saja dilihat dari aspek/sisi pendapatan, kepemilikan aset produksi dan harta benda, melainkan kemiskinan juga mencakup kerentanan dan kerawanan orang/kelompok orang menjadi miskin, dan keterbatasan akses kaum miskin pada keseluruhan proses kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka.

Pemerintah Daerah harus melindungi hak-hak dasar warga terutama kaum miskin, dan memastikan adanya kebijakan pemenuhan hak-hak dasar tersebut. Inilah yang disebut sebagai perubahan paradigma penanggulangan kemiskinan dari berbasis proyek dan sektoral menjadi berbasis hak-hak dasar kaum miskin. Paradigma penanggulangan kemiskinan yang berbasis hak-hak dasar warga sangat relevan dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia saat ini. Melalui paradigma ini diharapkan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat terutama kaum miskin. Pengakuan terhadap hak-hak dasar memberikan penegasan bahwa seluruh program penanggulangan kemiskinan tidak lagi menjadi beban atau biaya pembangunan (cost of development) melainkan sebagai investasi pembangunan (development of investment) dalam jangka panjang. Keberhasilan pelaksanaan strategi, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang ditentukan dari bagaimana kualitas kerjasama antar sektor terwujud.

Dalam fungsi koordinasi dan pengendaliannya, TKPK mengharapkan senantiasa dukungan dan sinergi dari semua pihak agar bersama-sama semua elemen mampu mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Adil dan Sejahtera, Amin.



P E M E R I N T A H
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2018